

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*)  
SERTA BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER  
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-  
NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM  
(OKI)**



Oleh:  
**MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO**  
**NIM: 1430316009**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor  
Ilmu Ekonomi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2020**

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*)  
SERTA BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER  
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-  
NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM  
(OKI)**



Oleh:

**MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO**

**NIM: 1430316009**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
DISERTASI  
**YOGYAKARTA**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor  
Ilmu Ekonomi Islam

**YOGYAKARTA**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id


## PENGESAHAN

Judul Disertasi : PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
(GOVERNANCE) BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN  
MONETER DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI  
DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI  
KERJASAMA ISLAM (OKI)  
Ditulis oleh : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 23 Juli 2020

Rektor,  
Ketua Sidang,

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.  
NIP.: 19530727 198303 1 005



4

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2019), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO NOMOR INDUK: 1430316009 LAHIR DI SLEMAN, TANGGAL 14 MARET 1980,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI Ekonomi Islam, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE-734

YOGYAKARTA, 23 Juli 2020

AN.REKTOR,  
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

NIP.: 19530727 198303 1 005

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Judul Disertasi : PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) BAURAN  
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI  
STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM  
(OKI)

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.  
Sekretaris Sidang : Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA.  
(Promotor/Penguji)  
2. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt.  
(Promotor/Penguji)  
3. Dr. Sunaryati, S.E., M.Si.  
(Penguji)  
4. Prof. Drs. H. Nur Feriyanto, M.Si.  
(Penguji)  
5. Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.  
(Penguji)  
6. Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si.  
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2020

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3.00  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)// Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.  
NIP. 19701024 200112 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi ini** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM: 1430316009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**PASCARAJANA**

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA.

(  )

Promotor : Dr. Ibnu Qizam, SE., MSi., Ak., CA.

(  )



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) SERTA  
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM  
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA  
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2020  
Promotor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA.



**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) SERTA  
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM  
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA  
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Promotor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Ak., CA.

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) SERTA  
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM  
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA  
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Mei 2020  
Penguji

*[Signature]*  
Dr. Sunaryati, SE., MSi.

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) SERTA  
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM  
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA  
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juni 2020  
Penguji

  
Prof. Dr. Drs Nur Feriyanto, M. Si.

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*GOVERNANCE*) SERTA BAURAN  
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI  
DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM : 1430316009  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2020  
Penguji

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Drs. Akhsyim Afandi, M. A., Ph. D.

## ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menguji peran bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen dan Jordan tahun 1968 dengan memasukkan variabel kualitas institusi (*governance*) sebagai variabel yang memoderasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Model penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa penawaran uang (*money supply*, *M*) sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*, *G*) serta utang pemerintah (*public debt*, *D*) sebagai proksi dari kebijakan fiskal. Variabel indeks tata kelola pemerintahan (*governance index*, *INS*) terdiri 6 indikator yaitu 1). Suara dan akuntabilitas (*Voice and Accountability*); 2). Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme (*Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*); 3). Efektivitas pemerintah (*Government Effectiveness*); 4). Kualitas regulasi (*Regulatory Quality*); 5). Peraturan hukum (*Rule of Law*); 6). Pengawasan korupsi (*Control of Corruption*).

Obyek penelitian ini adalah seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berjumlah 57 negara. Dikarenakan keterbatasan data yang dapat diakses, maka terdapat 46 negara yang terpilih sebagai sampel penelitian dengan periode penelitian tahun 2005-2018. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel moderasian yang terdiri dari 28 persamaan. Variabel kontrol yang digunakan adalah jumlah penduduk dan investasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (jumlah uang beredar) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan model St. Louis oleh Andersen dan Jordan tahun 1968. Adapun kebijakan utang pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Hal ini menunjukkan peran penting kualitas tata kelola pemerintahan dalam perekonomian sebagaimana teori pertumbuhan ekonomi terkini.

Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) tidak mampu memoderasi pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Indeks tata kelola

pemerintahan (*governance*) lebih berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai moderator yang efektif bagi kebijakan ekonomi pemerintah. Indeks *governance* lebih efektif dalam memoderasi berbagai variabel ekonomi yang merupakan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *governance index*, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

**MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO:** The Roles of Governance and The Distribution of Fiscal and Monetary Policy in Economic Growth: A Study in Organization of Islamic Cooperation Members. Dissertation, Yogyakarta, Postgraduate Islamic State University (PPs UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Taking the governance quality as a variable initiating fiscal and monetary policy for economic growth into account, the study aims at evaluating the roles of its distribution using St. Louis model developed by Andersen and Jordan in 1968. Money supply (M) as monetary policy proxy is the independent variable while the government expenditure (G) and public debt (D) as fiscal proxies are the dependent ones. The governance index (INS) variable constitutes 6 indicators: 1) voice and accountability; 2) political stability and absence of violence/terrorism; 3) government effectiveness; 4) regulatory quality; 5) rule of law; 6) control of corruption.

Due to data-access practical problem, 46 nations out of 57 members of the organization were the samples within the 2005 to 2018 periods. Moderating panel data regression with 28 equations was used to analyze. Population and investment were the control variable.

The study shows that fiscal policy (the government expenditure) and monetary policy (the money supply) influenced the economic growth significantly. Public debt, however, influenced negatively to the OIC members' economic growth while the governance gave positive influence significantly. It proved the significance of governance quality in recent economic growth.

Governance was unable to act as an effective moderator to the policy, but it worked directly influencing the economic growth of OIC members. The governance index worked more effectively moderating any economic variable, which is basically the people's economic activities.

**Key words:** governance index, fiscal and monetary policy, economic Growth

## ملخص البحث

يرمي هذا البحث إلى دراسة دور المزج بين السياسات المالية والنقدية على أساس نموذج سانت لويس St. Louis الذي قام بتطويره أندرسن Anderson وجوردن Jordan عام 1968 من خلال تضمين متغيرات الجودة للحكومة باعتبارها متغيرات تدير السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادي. يعتمد هذا البحث على المتغيرات المستقلة في شكل العرض النقدي (M) بوصفه عملا استباقيا من السياسات النقدية ومتغيرات الإنفاق الحكومي (G)، والدين الحكومي (D) بصفته عملا استباقيا من السياسة المالية. تتكون متغيرات الحكومة من 6 مؤشرات، وهي (1) التصويت والخضوع للمساءلة؛ (2) الاستقرار السياسي وغياب العنف أو الإرهاب؛ (3) فعالية الحكومة؛ (4) الجودة التنظيمية؛ (5) قواعد القانون؛ (6) السيطرة على الفساد.

يتخذ هذا البحث جميع الدول المنضمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي يبلغ عددها 57 دولة كموضوعات البحث، ومنها تم اختيار 46 دولة كعينات بحثية، نظرا للبيانات المحدودة التي يمكن الوصول إليها، خلال فترة الدراسة 2005-2018. والأداة التحليلية المستخدمة في هذا البحث هي انحدار البيانات المعتدلة المكونة من 28 معادلة، بينما متغيرات التحكم التي يتم استخدامها هي السكان والاستثمار.

يتوصل هذا البحث إلى أن السياسات المالية (الإنفاق الحكومي) والسياسات النقدية (مجموع النقد المتداول) لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي كما أشار إليه أندرسن Anderson و جوردن Jordan عن طريق نموذج سانت لويس عام 1968. وبالنسبة لسياسات الدين الحكومي تآثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. أما نوعية الحكومة فتآثر تأثيرا إيجابيا كبيرا على النمو الاقتصادي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وهذا يوضح أن جودة الحكومة لها دور مهم في الاقتصاد كما وضحته نظرية النمو الاقتصادي الحالية.

ولا تستطيع جودة الحكومة أن تحكم تأثير المزج بين السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وتعمل مؤشرات الحكومة كثيرا وبشكل مباشر في النمو الاقتصادي، ولا تعمل كوسيلة فعالة للسياسات الاقتصادية الحكومية. وتعتبر مؤشرات الحكومة أكثر فعالية في إدارة المتغيرات الاقتصادية المختلفة التي تشكل النشاط الاقتصادي للمجتمع.

**الكلمات المفتاحية: مؤشرات الحكومة، السياسات المالية والنقدية، النمو الاقتصادي**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌---	Fathah	ditulis	A
----◌---	Kasrah	ditulis	i
----◌---	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillobbil 'aalamiin*. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan riḍa-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dan menyajikannya ke hadapan pembaca yang budiman. Disertasi ini berjudul **“Peran Tata Kelola Pemerintahan (Governance) serta Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pertumbuhan Ekonomi: Studi di Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)”**. Seiring dengan selesainya disertasi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak:

1. Plt. Rektor (*Dr. Phil. Sahiron, M.A.*), Direktur Pascasarjana (Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.) Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, MA., Ph.D.) dan segenap civitas akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. dan Dr. Ibnu Qizam, SE., MSi., Ak., CA., selaku Promotor yang dengan ramah, sabar, dan teliti dalam memberikan saran, kritik dan motivasi pada penulis sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam disertasi ini.
3. Prof. Dr. Drs Nur Feriyanto, M. Si. selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna penyempurnaan disertasi ini.
4. Dr. Sunaryati, SE., MSi. selaku penguji dalam Ujian Pendahuluan dan Ujian Tertutup yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna penyempurnaan disertasi ini.
5. Drs. Akhsyim Afandi, M. A., Ph. D. selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna penyempurnaan disertasi ini.

6. Seluruh pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis guna menempuh pendidikan doktor ini.
7. Ayahanda H. Drs. Slamet Darmanto dan Ibunda Hj. Purwanti serta mertua penulis, H. Chairul Amri Malin Muhammad (Alm.) dan Hj. Asnawiyar; semoga Allah mengampuni kekhilafan mereka, mengasihi mereka, dan membalas amal kebajikan mereka dengan sebaik-baik balasan, yang telah berkorban secara moril dan materiil serta telah mendidik dan memperjuangkan penulis hingga dapat mengenyam pendidikan tinggi.
8. Istri tercinta Khamsiyati, SE. dan anak-anak tersayang: 1) Alia Faiza Khariyah, 2) Azzam Faizul Ghifari, dan 3) Alfarizi Fauzul Ghifari, dukungan, kesabaran dan doa kalian adalah *spirit* yang terus memacu penulis untuk menyelesaikan studi ini.
9. Saudara penulis: 1) Hanif Rohmawati, 2) Latif Amrullah, MA. 3) Azizah Nurul Izzah, dan segenap keluarga yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan saran, dan kritik konstruktifnya terhadap penulisan disertasi ini.

*Al haqqu min rabbika.* Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memberi kontribusi nyata bagi problematika kehidupan di masa kontemporer.

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Penulis,  
Muhammad Ghafur Wibowo  
NIM: 1430316009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR</b> .....	<b>iii</b>
<b>YUDISIUM</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR</b> .....	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxx</b>

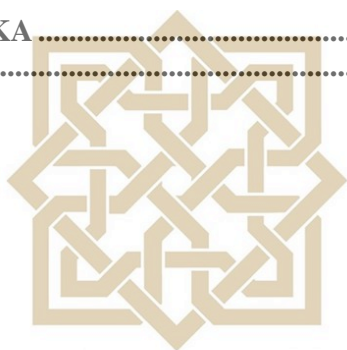
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Orisinalitas Penelitian.....	20
F. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b> .....	<b>23</b>
A. Kajian Pustaka .....	23
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor Penentunya	23
2. Dampak Bauran Kebijakan ( <i>Policy Mix</i> ) Fiskal dan Moneter terhadap Perekonomian.....	33
3. Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	38

B.	Landasan Teori .....	56
1.	Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	57
2.	Islam dan Pembangunan Ekonomi .....	62
3.	Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter ( <i>Fiscal and Monetary Mix</i> ) .....	70
4.	Ekonomi Kelembagaan dan Peningkatan Efektivitas Kebijakan.....	78
5.	Tata Kelola ( <i>Governance</i> ) dalam Pandangan “Barat” ( <i>Western</i> ) dan Islam.....	82
C.	Pengembangan Hipotesis .....	94
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>		<b>103</b>
A.	Desain Penelitian .....	103
B.	Populasi dan Sampel.....	104
C.	Pengembangan Model Penelitian .....	104
D.	Definisi Operasional Variabel .....	112
1.	Variabel Terikat (Dependen).....	112
2.	Variabel Bebas (Independen) .....	113
3.	Variabel Pemoderasi.....	114
4.	Variabel Kontrol.....	118
E.	Teknik Analisis Data .....	119
1.	Pendekatan <i>Common Effect Model</i> .....	120
2.	Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> .....	120
3.	Pendekatan <i>Random Effect Model</i> .....	121
F.	Pengujian Hipotesis.....	122
1.	Uji Signifikansi Model .....	122
2.	Koefisien Determinasi $R^2$ ( <i>Goodness of Fit</i> ).....	123
3.	Uji Parsial.....	123
4.	Analisis Regresi Moderasian ( <i>Moderated Regression Analysis, MRA</i> ) .....	125
5.	<i>Robustness Test</i> .....	132
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>136</b>
A.	Profil Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 136	
B.	Deskripsi Data Penelitian .....	140
C.	Analisis Regresi Data Panel .....	149



1. Pemilihan Model Terbaik .....	149
2. Analisis Regresi Data Panel .....	150
D. Pembahasan .....	174
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>209</b>
A. Kesimpulan .....	209
B. Implikasi Penelitian .....	213
C. Keterbatasan Penelitian .....	215
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>217</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>236</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global .....	2
Tabel I.2	Perbandingan Indikator Kinerja Ekonomi Negara-negara .....	7
Tabel II.1	Perkembangan Teori dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	57
Tabel II.2	Dampak Kebijakan pada Pendapatan dan Tingkat Bunga .....	78
Tabel III.1	Daftar Penelitian Berdasarkan Model St. Louis.....	105
Tabel III.2	Daftar Penelitian Mengenai Dampak Utang Pemerintah.....	106
Tabel III.3	Daftar Penelitian Mengenai Hubungan Kualitas Institusi.....	107
Tabel III.4	Daftar Penelitian dengan Variabel Institusi sebagai Pemoderasi .....	109
Tabel III.5	Sumber Data <i>World Governance Indicator</i> . .....	117
Tabel IV.1	Negara OKI dan Nilai Rata-rata Indeks <i>Governance</i> .....	140
Tabel IV.2	Deskriptif Variabel Terikat dan Variabel Bebas Tahun 2005-2018 .....	141
Tabel IV.3	Deskriptif Variabel Moderasi (indek <i>Governance</i> ) Tahun 2005-2018. ....	143
Tabel IV.4	Statistik Deskriptif Variabel Kontrol: Populasi dan FDI/PDB .....	148
Tabel IV.5	Hasil Regresi Data Panel Model 1-7 (Tanpa Interaksi) .....	154

Tabel IV.6	Hasil Regresi Data Panel Model 8-14 (Interaksi Pengeluaran Pemerintah & Governance).....	159
Tabel IV.7	Hasil Regresi Data Panel Model 15-21 (Interaksi Utang & Governance).....	163
Tabel IV.8	Hasil Regresi Data Panel Model 22-28 (Interaksi Jumlah Uang Beredar dan Governance) .....	167
Tabel IV.9	Nilai KMO dan <i>Bartlett's Test</i> dan Eigenvalues....	172
Tabel IV.10	Hasil Uji <i>Robust</i> dengan variabel AFGV.....	173
Tabel IV.11	Ringkasan Koefisien Variabel INS dan AFGV .....	174
Tabel IV.12	Perbandingan Rata-rata Indeks <i>Governance</i> Antar-Region.....	205



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kerangka Transmisi Operasional Kebijakan Moneter.....	74
Gambar II. 2	Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter .....	76
Gambar II. 3	Alur Dampak Biaya Transaksi terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	80
Gambar II. 4	Pendekatan Tauhid dan Syura dalam Tata Kelola ( <i>Governance</i> ).....	87
Gambar II. 5	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	102
Gambar IV. 1	Penyebaran Penduduk Dunia Berdasarkan Agama.....	136
Gambar IV. 2	Total PDB (kiri) dan PDB per kapita (kanan), berdasar PPP.....	139
Gambar IV. 3	Daftar 10 Negara OKI dengan PDB Total dan PDB Per Kapita Terbesar (2017).....	140
Gambar IV. 4	Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	177
Gambar IV. 5	Dampak Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	187
Gambar IV. 6	Hubungan Indeks <i>Governance</i> (RQ & VA) dan PDB perkapita.....	193
Gambar IV. 7	Hubungan Indeks <i>Governance</i> (PS & CC) dan PDB perkapita.....	193

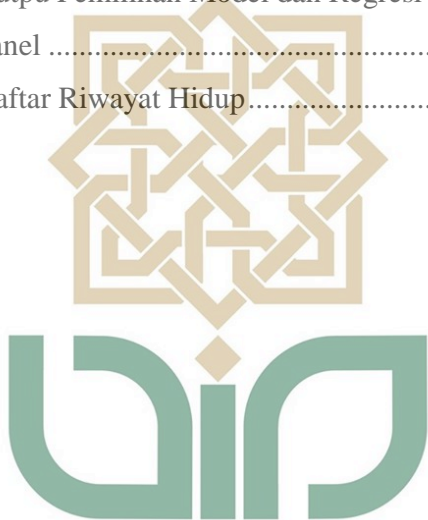
Gambar IV. 8 Hubungan Indeks *Governance* (GE & RL) dan PDB perkapita..... 194

Gambar IV. 9 Rata-rata Nilai INS Tahun 2005-2018 ..... 196



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Negara-Negara Anggota OKI.....	236
Lampiran 2	Data Mentah Penelitian.....	237
Lampiran 3	Analisis Deskriptif .....	272
Lampiran 4	Output Hasil Analisis Faktor .....	274
Lampiran 5	Outpu Pemilihan Model dan Regresi Data Panel .....	278
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	405



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran penting pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat (kepentingan umum/publik) yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta (non pemerintah) guna mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Hal ini karena dalam sistem perekonomian yang menganut paham ekonomi liberal (atau cenderung ke liberal), maka pihak swasta hanya berorientasi pada bidang yang menghasilkan keuntungan bagi mereka. Pembangunan sarana umum, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya harus disediakan oleh negara.<sup>2</sup>

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanah konstitusi. Kesejahteraan dapat dicapai ketika kestabilan perekonomian diraih, yang dapat dilihat dari pendapatan nasional meningkat, tingkat harga (inflasi) yang rendah, pertumbuhan pendapatan (ekonomi) yang tinggi, serta kemiskinan dan pengangguran yang rendah pula.<sup>3</sup> Salah satu variabel ekonomi makro yang bisa menunjukkan tingkat pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang darinya bisa dihitung tingkat pertumbuhan ekonomi negara dari waktu ke waktu.

Tingginya PDB memang bukan sesuatu yang mutlak untuk menjelaskan bahwa seluruh rakyat pasti merasa sejahtera, namun dengan PDB yang tinggi maka tingkat kesejahteraan relatif lebih bisa

---

<sup>1</sup> Sijbren Cnossen and Hans-Werner Sinn, *Public Finance and Public Policy in the New Century* (Manila: The MIT Press, 2003), III <<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>.

<sup>2</sup> Franz Josef Stegmann, "Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement," *ST AUGUSTINE PAPERS*, 2004, v, 9-11.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, 3rd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 22.

dicapai. Oleh karena itu, membandingkan kinerja ekonomi antarnegara paling sering dilakukan dengan membandingkan PDB tiap-tiap negara tersebut. PDB yang tinggi menggambarkan kemampuan rakyat suatu negara dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.<sup>4</sup>

Berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) dan juga Bank Pembangunan Asia selalu melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Tabel I.1 berikut menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai kawasan.

Tabel I.1 Tabel Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global<sup>5</sup>

Kelompok Negara	2013	2014	2015	2016	2017
<b>A. Dunia</b>	3,5	3,6	3,5	3,2	3,8
<b>B. Negara-negara maju</b>	1,3	2,1	2,3	1,7	2,3
Amerika Serikat	1,7	2,6	2,9	1,5	2,3
Jepang	2,0	0,4	1,4	0,9	1,7
Inggris	2,1	3,1	2,3	1,9	1,8
Korea	2,9	3,3	2,8	2,8	3,1
Kawasan Eropa	-0,2	1,3	2,1	1,8	2,3
Jerman	0,6	1,9	1,5	1,9	2,5
Perancis	0,6	0,9	1,1	1,2	1,8
Belanda	-0,2	1,4	2,3	2,2	3,1
<b>C. Negara-negara berkembang</b>	5,1	4,7	4,3	4,4	4,8
Sub-Sahara Afrika	5,3	5,1	3,4	1,4	2,8
Asia	6,9	6,8	6,8	6,5	6,5
Tiongkok	7,8	7,3	6,9	6,7	6,9
India	6,4	7,4	8,2	7,1	6,7
Amerika Latin dan Karibia	2,9	1,3	0,3	-0,6	1,3
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	2,6	2,8	2,5	4,9	2,6
Eropa	4,9	3,9	4,7	3,2	5,8

<sup>4</sup> N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 7th ed (New York: Worth Publisher, 2010), 42.

<sup>5</sup> Sofaria Ayuni and others, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018* (Jakarta, 2018), 4.



Negara-negara persemakmuran	2,5	1,0	-2,0	0,4	2,1
<b>D. Negara-negara ASEAN</b>	5,2	4,7	4,6	4,7	5,2
Malaysia	4,7	6,0	5,0	4,2	5,9
Filipina	7,1	6,1	6,1	6,9	6,7
Singapura	5,1	3,9	2,2	2,4	3,6
Thailand	2,7	1,0	3,0	3,3	3,9
Indonesia	5,6	5,0	4,9	5,0	5,1
Vietnam	5,4	6,0	6,7	6,2	6,8

Sumber: IMF dan Bank Dunia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2018 (BPS)

Berdasar tabel I.1 yang dikutip Badan Pusat Statistik dari IMF dan Bank Dunia tersebut ditunjukkan bahwa perekonomian dunia tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 (dari 3,2% menjadi 3,8%) yang salah satunya ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekonomi China dan India.<sup>6</sup> Secara umum, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju relatif lebih rendah dibanding negara berkembang karena mereka sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja dan faktor produksi yang sudah/hampir penuh (*full employment*).

Dalam rangka mempengaruhi perekonomian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang baik, negara menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, yang utama adalah kebijakan fiskal (domain pemerintah) dan kebijakan moneter (domain bank sentral).<sup>7</sup> Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter terkait dengan pengaturan jumlah uang beredar guna mempengaruhi perekonomian.<sup>8</sup> Bauran kedua kebijakan ini diharapkan bisa berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Terjadi perdebatan yang panjang mengenai kebijakan apa yang lebih efektif dalam mempengaruhi perekonomian di antara kedua jenis kebijakan tersebut. Kelompok Keynesian berpandangan bahwa kebijakan fiskal lebih efektif dalam mempengaruhi perekonomian,

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian*, 4.

<sup>7</sup> Mankiw, *Macroeconomics*, 263.

<sup>8</sup> Richard Froyen, *Macroeconomics: Theories and Policies*, 7th edn (New York: Macmillan, 2002), 71-73.

sedangkan golongan Monetaris berpandangan sebaliknya. Menurut golongan Monetaris yang mendasarkan pemikirannya pada Teori Kuantitas Uang, kebijakan moneter akan lebih efektif mempengaruhi perekonomian. Guna membuktikannya secara empiris, Andersen dan Jordan pada tahun 1968 menguji efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan membentuk suatu persamaan yang kemudian disebut dengan model St. Louis.<sup>9</sup> Model ini menggunakan variabel penawaran uang (*money supply*, M) sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*, G) sebagai proksi dari kebijakan fiskal. Adapun variabel terikat dalam model ini adalah pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto, PDB atau Y), sehingga persamaan tersebut dapat ditulis  $Y = f(M, G)$ .

Banyak penelitian yang mengacu pada model St. Louis seperti yang dilakukan oleh Darrat dengan obyek negara-negara Amerika Latin dan menemukan bahwa kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup> Temuan ini didukung oleh Halcon dan Leon untuk kasus di negara Filipina,<sup>11</sup> namun berbeda dengan temuan Fatima dan Iqbal untuk kasus di beberapa negara Asia terpilih yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan fiskal.<sup>12</sup> Temuan penelitian Ajayi dan Aluko juga mengkonfirmasi hasil penelitian Fatima dan Iqbal untuk kasus di Nigeria.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Leonall C. Andersen and Jerry L. Jordan, "Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization", *Review*, 68.8 (1968), 11–24.

<sup>10</sup> Ali F. Darrat, "The Dominant Influence of Fiscal Actions in Developing Countries", *Eastern Economic Journal*, 10.3 (1984), 271–84.

<sup>11</sup> Neil Angelo C. Halcon and Leah Melissa T. De Leon, "Efficiency of Fiscal And Monetary Policies In The Philippines: The St. Louis Model Approach", *Bangka Sentral Review*, July, 2004, 33–44.

<sup>12</sup> Ambreen Fatima and Azhar Iqbal, "The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies: An Econometric Study", *Pakistan Economic and Social Review*, 41.1/2 (2003), 93–116.

<sup>13</sup> Michael Adebayo Ajayi and Olufemi Adewale Aluko, "Evaluating the Relative Impact of Monetary and Fiscal Policy in Nigeria Using the St. Louis Equation", *Acta Universitatis Danubius : Oeconomica*, 13.1 (2017), 40–50.

Selain itu, masih banyak penelitian lain yang mengkaji efektivitas kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja perekonomian yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi mayoritas berdasarkan pada model St. Louis tersebut. Beberapa di antaranya adalah Ali, Irum, dan Ali yang meneliti di 4 negara Asia Selatan;<sup>14</sup> Malawi meneliti di Yordania dan Tunisia;<sup>15</sup> Jawaid, Arif, dan Naeemullah meneliti di Pakistan;<sup>16</sup> serta Chowdhury dan Afzal meneliti di Bangladesh.<sup>17</sup>

Model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen & Jordan yang merupakan ekonom di Federal Reserve Bank of St. Louis, Amerika Serikat (karenanya kemudian model ini disebut sebagai model St. Louis),<sup>18</sup> tahun 1968 sebenarnya sudah banyak yang mengkaji dan mengembangkannya. Hal ini dilakukan mengingat model tersebut menyederhanakan determinan pertumbuhan ekonomi hanya berupa kebijakan fiskal dan moneter saja. Beberapa peneliti selanjutnya menambah variabel ekonomi dan politik yang berbeda di dalam model yang mereka bangun. Variabel yang bisa ditambahkan di antaranya adalah ekspor;<sup>19</sup> nilai tukar;<sup>20</sup> kurs dan inflasi;<sup>21</sup> nilai

---

<sup>14</sup> Shahid Ali, Somia Irum, and Asghar Ali, "Whether Fiscal Stance or Monetary Policy Is Effective for Economic Growth in Case of South Asian Countries?", *Pakistan Development Review*, 47.4 (2008), 791–99.

<sup>15</sup> A. I. Malawi, 'The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in Economic Activity: A Comparison between Jordan and Tunisia by Using an Error Correction Mechanism (ECM)', *Dirasat, Administrative Sciences*, 36.1 (2009), 191–98.

<sup>16</sup> Syed Tehseen Jawaid, Imtiaz Arif, and S. M. Naeemullah, 'Comparative Analysis of Monetary and Fiscal Policy: A Case Study of Pakistan', *MPRA Paper No. 30850*, (2011), 1–11.

<sup>17</sup> M. N. I. Chowdhury, L. S. & Afzal, 'The Effectiveness of Monetary Policy and Fiscal Policy in Bangladesh', *Journal of Applied Business and Economics*, 17.1 (2015), 78–85.

<sup>18</sup> Manuel Vanegas, 'Tourism, Macroeconomics, Growth, and the St. Louis Equation', *Tourism Review International*, 22.1 (2018), 3–21

<sup>19</sup> Halcon and Leon, 'Efficiency of Fiscal And Monetary'; Fatima and Iqbal, 'The Relative Effectiveness of Monetary'.

<sup>20</sup> Tomislav Ćorić and Milan Deskar-Škrbić, 'Monetary and Fiscal Policy Mix in a Small Open Economy: The Case of Croatia', *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 28.1 (2015), 407–21.

tukar dan suku bunga,<sup>22</sup> pendapatan pariwisata,<sup>23</sup> bahkan beberapa variabel politik seperti indeks kebebasan sipil, indeks perpolitikan, dan indeks hak politik rakyat.<sup>24</sup>

Satu hal yang menarik dari tabel I.1 di atas adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara ditambah dengan Afghanistan dan Pakistan yang sebesar 2,6% di tahun 2017. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kawasan di Amerika Latin, namun lebih rendah dari Sub-Sahara Afrika apalagi ASEAN (Association of South East Asia Countries) yang sama-sama negara berkembang. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Demikian pula Pakistan dan Afghanistan yang sebenarnya masuk wilayah lain, namun juga berpenduduk mayoritas muslim.

Konfirmasi dengan data lain yang dihimpun oleh Kuran semakin menunjukkan ketertinggalan negara-negara muslim (berpenduduk mayoritas muslim) dalam hal kinerja perekonomian mereka. Bersumber pada data yang diterbitkan oleh UNDP, Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja perekonomian antara negara berpenduduk mayoritas muslim dan non-muslim.<sup>25</sup>

Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja ekonomi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI (Organisation of Islamic Cooperation, OIC) dengan data global dan negara-negara non-OKI tahun 2014. Dalam hal kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan

---

<sup>21</sup> A. Ogar, S. E. Nkamare, and E. G. Emori, 'Fiscal and Monetary Policy and Its Effect on the Growth of Nigeria Economy', *European Journal of Business and Management*, 6.29 (2014), 220–32.

<sup>22</sup> Olanipekun Emmanuel Falade and Benjamin Ayodele Folorunso, 'Fiscal and Monetary Policy Instruments and Economic Growth Sustainability in Nigeria', *American Journal of Economics*, 5.6 (2015), 587–94.

<sup>23</sup> Vanegas., 'Tourism, Macroeconomics, Growth,

<sup>24</sup> Tariq Hussain and Muhammad Wasif Siddiqi, 'Fiscal, Monetary Policies and Institutions' Role (Political, Social and Economic) in Pakistan', *Theoretical and Applied Economics*, 19.6 (2012), 33–50.

<sup>25</sup> Timur Kuran, 'Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links', *Journal of Economic Literature*, 56.4 (2018), 1295.

Manusia (IPM) di tabel I.2, nilai IPM (*Human Development Index*, HDI) menunjukkan ketertinggalan yang cukup jauh antara nilai IPM negara muslim (0,61) dengan nilai IPM dunia (0,71) apalagi dengan nilai IPM negara non-muslim (0,74).

Tabel I.2 Perbandingan Indikator Kinerja Ekonomi Negara-negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Tahun 2014

Region, Country, or Country Grouping	Population (millions)	Human Development Index (0-1)	Life expectancy at birth (years)	Adult literacy rate (%)	Gross Domestic Product Per Capita (US\$, PPP)
Afghanistan	31	0.47	60.4	38.2	1,934
Arab League	378	0.66	70.5	77.9	17,428
ASEAN, Muslim-maj.	283	0.69	69.5	95.4	12,809
Balkans, Muslim-maj.	9	0.73	75.8	98.1	10,636
Bangladesh	159	0.57	71.6	61.5	3,332
Ex-USSR, Muslim-maj.	75	0.70	69.0	99.8	12,099
Iran	79	0.76	75.4	84.6	17,365
Non-Arab Africa, Muslim-maj.	96	0.39	55.8	54.8	3,604
Pakistan	185	0.54	66.2	55.6	5,041
Turkey	76	0.76	75.3	95.4	19,618
<b>OIC</b>	<b>1,678</b>	<b>0.61</b>	<b>66.5</b>	<b>73.3</b>	<b>10,015</b>
<b>World</b>	<b>7,347</b>	<b>0.71</b>	<b>71.4</b>	<b>85.2</b>	<b>15,740</b>
<b>Non-OIC</b>	<b>5,669</b>	<b>0.74</b>	<b>72.8</b>	<b>88.9</b>	<b>17,500</b>
ASEAN, Muslim-min.	274	0.64	70.6	93.8	8,417
Balkans, Muslim-min.	59	0.81	76.3	98.0	20,693
China	1,371	0.73	75.8	95.1	14,238
Ex-USSR, Muslim-min.	71	0.76	71.8	99.7	10,832
India	1,311	0.61	68.0	69.3	6,088
Latin America	633	0.75	75.0	92.6	15,581
Non-Arab Africa, Muslim-min.	859	0.52	58.7	65.3	3,907
OECD (except Turkey)	1,204	0.88	80.8	99.8	42,216
Russia	143	0.80	70.1	99.7	24,451

Sumber: UNDP, *Human Development Report 2015*, dalam Kuran (2018).

Dari sisi kualitas kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, capaian negara-negara muslim juga lebih rendah (66,5 tahun) dari data dunia (71,4 tahun) dan negara non-muslim (72,8). Kualitas pendidikan negara-negara muslim yang diukur dari tingkat literasi (kemampuan membaca) juga jauh tertinggal (73,3%) dari total data dunia (85,2%) apalagi negara-negara non-muslim (88,9%). Rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara-negara muslim akhirnya secara tidak langsung berdampak pada rendahnya pendapatan per penduduk (PDB per kapita) mereka yang sebesar USD 10.015 per tahun, jauh dibandingkan data dunia (USD 15.740) dan data negara non-muslim (USD 17.500).

Ketertinggalan dalam bidang ekonomi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dari negara-negara lain sudah sejak lama menjadi kajian para pemikir muslim. Monzer Kahf, salah seorang ekonom muslim dunia, menulis artikel panjang yang berjudul *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy*.<sup>26</sup> Menurut Kahf, isu ketertinggalan ekonomi negara muslim dan kaitannya dengan defisit anggaran adalah sebuah masalah yang serius, mengingat fenomena tersebut sudah menjangkiti sejak puluhan tahun lalu. Mayoritas negara muslim yang merupakan negara berkembang memiliki utang publik (pemerintah) yang besar. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan defisit anggaran tersebut, yaitu korupsi dan pembelanjaan sia-sia; subsidi harga; inefisiensi pada sektor publik yang besar; serta belanja pertahanan yang besar.<sup>27</sup>

Sejalan dengan Kahf maka Kuran kemudian menjawab pertanyaan tentang mengapa negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam tertinggal secara ekonomi dari wilayah lain.<sup>28</sup> Menurut Kuran, dipandang dari sudut sejarah, beberapa penyebab utama ketertinggalan tersebut adalah 1) hukum kontrak yang berorientasi pada individu (*individually oriented contract law*), 2) pembiayaan tanpa bank (*finance without banks*), 3) kesewenangan perpajakan dan lemahnya pengakuan hak milik pribadi (*arbitrary taxation and weak private property rights*), 4) sistem perwarisan yang egaliter (*egalitarian inheritance system*), 5) penyediaan barang publik yang tidak memadai.

Penilaian serupa juga disampaikan oleh Lackey ketika menganalisis mengapa negara-negara Islam yang dikaruniai dengan kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah, namun gagal

---

<sup>26</sup> Monzer Kahf, 'Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy', *IRTI Research Paper*, 42 (1997).

<sup>27</sup> Kahf, 'Instruments of Meeting', 21.

<sup>28</sup> Timur Kuran, 'Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation', *Journal of Economic Perspectives*, 18.3 (2004), 71–90 <<https://doi.org/10.1257/0895330042162421>>.

membangun ekonominya dengan baik.<sup>29</sup> Negara-negara muslim yang berada di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara secara umum memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas. Namun demikian, mereka tertinggal jauh dari negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya yang cukup, seperti Belanda, Swiss, dan negara-negara maju lainnya. Menurut Lackey, lemahnya pendidikan, ketidakstabilan keamanan, serta kepastian hukum yang lemah menjadi penyebab utama masalah tersebut. Selain itu, nasib wanita yang sering ditinggalkan dalam berbagai aspek kehidupan juga menambah berat kondisi tersebut. Terlebih lagi, secara kelembagaan, buruknya pelayanan publik serta tingginya korupsi semakin memperparah keterpurukan ekonomi negara-negara muslim.

Penelitian terkait dengan kinerja perekonomian khususnya pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim sudah cukup banyak dilakukan. Pryor menganalisis pengaruh populasi penduduk muslim terhadap pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan sistem ekonomi yang dianut di 62 negara berpenduduk muslim.<sup>30</sup> Pryor menyatakan bahwa kehadiran Islam yang diukur dari persentase penduduk muslim hanya berpengaruh kecil dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian yang serupa ditemukan oleh Khalfaoui yang menunjukkan bahwa pengaruh persentase jumlah penduduk muslim di 20 negara muslim terpilih tahun 1990-2014 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>31</sup> Temuan Khalfaoui sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Campante dan Drott yang

---

<sup>29</sup> [Ryan Lackey](https://www.forbes.com/sites/quora/2013/01/08/why-have-the-islamic-countries-failed-to-develop-even-with-resources-like-oil-while-countries-with-no-resources-like-switzerland-have-flourished/#295b6023282c), *Why Have the Islamic Countries Failed To Develop Even With Resources Like Oil, While Countries With No Resources Like Switzerland Have Flourished?* <https://www.forbes.com/sites/quora/2013/01/08/why-have-the-islamic-countries-failed-to-develop-even-with-resources-like-oil-while-countries-with-no-resources-like-switzerland-have-flourished/#295b6023282c> diakses pada 20 Januari 2019 pukul 10.03 WIB.

<sup>30</sup> Frederic L. Pryor, 'The Economic Impact of Islam on Developing Countries', *World Development*, 35.11 (2007), 1815-35.

<sup>31</sup> Hamdi Khalfaoui, "Islam and Economic Growth," *International Journal of Social Science Studies*, vol. 3, no. 6, (November 2015): 62-69.

menganalisis pengaruh ibadah Ramadhan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.<sup>32</sup> Penelitian yang dilakukan lintas negara muslim tahun 1981-2014 itu menemukan bahwa praktik ibadah yang diukur melalui jumlah jam pada bulan Ramadhan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun demikian berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kebahagiaan (*happiness*).

Variabel agama Islam, yang diproksikan dengan persentase jumlah penduduk muslim di suatu negara tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam penelitian Çamlıbel, demikian pula indeks politik. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah indeks kebebasan ekonomi, modal manusia dan indeks pembangunan manusia.<sup>33</sup> Adapun studi yang dilakukan Slesman dkk di 39 negara anggota OKI tahun 1983-2009 menemukan bahwa indeks kualitas institusi politik dan indeks institusi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, variabel indeks institusi pencegahan konflik (*conflict-preventing institutions*), dan indeks akuntabilitas demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan kualitas institusi politik dan ekonominya.<sup>34</sup>

Pentingnya peran institusi juga tercermin dalam hasil penelitian Boukhatem dan Moussa tentang pengaruh kehadiran keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 negara Timur

---

<sup>32</sup> Filipe Campante and David Yanagizawa-Drott, 'Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan', *The Quarterly Journal of Economics*, 130 (2015), 615–58.

<sup>33</sup> Durmuş Alper Çamlıbel, 'What Are the Determinants of Economic Growth in Muslim Countries?', *International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 11.1 (2014), 403–26.

<sup>34</sup> Ly Slesman, Ahmad Zubaidi Baharumshah, and Wahabuddin Ra'ees, 'Institutional Infrastructure and Economic Growth in Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)', *Economic Modelling*, 51 (2015), 214–26.



Tengah tahun 2000-2014.<sup>35</sup> Keuangan Islam terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun demikian fungsi ini terhambat oleh lemahnya institusi di berbagai negara tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kebijakan institusional dan ekonomi yang bisa mengoptimalkan peran keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pandangan di atas mengarahkan pada masalah buruknya kelembagaan (institusi) di negara muslim sebagai salah satu penyebab ketertinggalan negara tersebut dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. Negara muslim tidak hanya tertinggal dalam hal kinerja ekonomi, namun juga berbagai ukuran kualitas kehidupan lainnya. Kajian yang mengaitkan kinerja ekonomi dan aspek institusi ini dikenal dengan ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).

Penelitian yang mengaitkan antara variabel institusi dan kinerja perekonomian (pertumbuhan ekonomi) sudah banyak dilakukan sejak dekade 1980-an diawali salah satunya oleh Scully;<sup>36</sup> disusul pada dekade 1990-an oleh Knack dan Keefer;<sup>37</sup> hingga saat ini oleh Williams;<sup>38</sup> Vianna dan Mollick;<sup>39</sup> Kar, Roy, dan Sen;<sup>40</sup> serta Boudreaux, Nikolaev, dan Klein.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> Jamel Boukhatem and Fatma Ben Moussa, 'The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries', *Borsa Istanbul Review*, 18.3 (2018), 231-47 <<https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>>.

<sup>36</sup> Gerald W. Scully, 'The Institutional Framework and Economic Development', *Journal of Political Economy*, 96.3 (1988), 652-62.

<sup>37</sup> Stephen Knack and Philip Keefer, 'Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures', *Economics and Politics*, 7.3 (1995), 207-27.

<sup>38</sup> Kevin Williams, 'Do Political Institutions Improve the Diminishing Effect of Financial Deepening on Growth? Evidence from Developing Countries', *Journal of Economics and Business*, 103 (2019), 13-24

<sup>39</sup> Andre C. Vianna and Andre V. Mollick, 'Institutions: Key Variable for Economic Development in Latin America', *Journal of Economics and Business*, 96 (2018), 42-58.

<sup>40</sup> Sabyasachi Kar, Amrita Roy, and Kunal Sen, 'The Double Trap: Institutions and Economic Development', *Economic Modelling*, 76 (2019), 243-59

<sup>41</sup> Christopher J. Boudreaux, Boris N. Nikolaev, and Peter Klein, 'Socio-Cognitive Traits and Entrepreneurship: The Moderating Role of Economic Institutions', *Journal of Business Venturing*, 34.1 (2019), 178-96.

Dalam bentuk yang sedikit berbeda, aspek kelembagaan terkadang muncul dengan istilah berbeda seperti kualitas birokrasi (*bureaucracy*) yang digunakan oleh Evans dan Rauch.<sup>42</sup> Aspek demokrasi (*democracy*) juga bisa menggambarkan peran kelembagaan politik terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Mathonnat dan Minea.<sup>43</sup>

Istilah lain dari kualitas institusi adalah tata kelola pemerintahan (*governance*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Kaufman, Kraay, dan Lobaton di Bank Dunia sejak dekade 1990-an.<sup>44</sup> Konsep *governance* telah memiliki instrumen pengukurannya sendiri yang merupakan pengembangan dari berbagai indeks kualitas institusi yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 6 indikator dalam indeks *governance* yaitu 1). Suara dan akuntabilitas (*Voice and Accountability*); 2). Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan /terorisme (*Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*); 3). Efektivitas pemerintah (*Government Effectiveness*); 4). Kualitas regulasi (*Regulatory Quality*); 5). Peraturan hukum (*Rule of Law*); 6). Pengawasan korupsi (*Control of Corruption*).<sup>45</sup>

Secara empiris, indeks kualitas pemerintahan sudah banyak diuji oleh para peneliti sejak awal tahun 2000-an seperti yang dilakukan oleh Olson, Sarna, dan Swamy;<sup>46</sup> juga Kaufman dan Kraay.<sup>47</sup> Kedua penelitian menunjukkan hasil bahwa negara dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang baik memiliki tingkat produktifitas yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong

---

<sup>42</sup> Peter Evans and James E. Rauch, 'Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economic Growth', *American Sociological Review*, 64.5 (1999), 748–65.

<sup>43</sup> Clément Mathonnat and Alexandru Minea, 'Forms of Democracy and Economic Growth Volatility', *Economic Modelling*, 2018, 1–10.

<sup>44</sup> Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton, 'Governance Matters', *Policy Research Working Paper*, 2196, 1999, 1–70.

<sup>45</sup> Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton, 'Governance Matters'.

<sup>46</sup> Mancur Jr Olson, Naveen Sarna, and Anand V Swamy, 'Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross-Country Differences in Productivity Growth', *Public Choice*, 102 (2000), 341–64.

<sup>47</sup> Daniel Kaufmann and Aart Kraay, 'Growth without Governance', *Policy Research Working Paper Series*, 2928 (2002), 1–50.

pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. *Governance* berperan penting (positif) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Peran tersebut dirasakan lebih efektif terjadi pada negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti menginteraksikan indeks *governance* dengan variabel lain. Sebagai contoh, Fraj, Hamdaoui, dan Maktouf menginteraksikan indeks *governance* dengan nilai tukar serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.<sup>48</sup> Adapun Bekhet dan Latif pada kesempatan yang lain mengaitkan indeks *governance* dengan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>49</sup> Interaksi antara nilai tukar dan teknologi dengan indeks *governance* pada kedua penelitian terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap isu pertumbuhan ekonomi masih tetap menarik untuk dilakukan hingga saat ini. Kajian yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya bauran kebijakan fiskal dan moneter serta efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan baru memasukkan berbagai variabel ekonomi maupun sosial yang terkait. Belum ada penelitian yang mengaitkan bauran kebijakan fiskal dan moneter tersebut dengan kualitas tata kelola pemerintah (*governance*) suatu wilayah atau antarnegara. Padahal, efektivitas kebijakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi yang melingkupi negara tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan (*governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi lintas negara. Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud menguji efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan

---

<sup>48</sup> Salma Hadj Fraj, Mekki Hamdaoui, and Samir Maktouf, 'Governance and Economic Growth: The Role of the Exchange Rate Regime', *International Economics*, 156 (2018), 326–64.

<sup>49</sup> Hussain Ali Bekhet, Nurul Wahilah, and Abdul Latif, 'The Impact of Technology in Society The Impact of Technological Innovation and Governance Institution Quality on Malaysia ' s Sustainable Growth : Evidence from a Dynamic Relationship', *Technology in Society*, 54 (2018), 27–40

mengembangkan model St. Louis yang dikenalkan oleh Andersen & Jordan tahun 1968. Model St. Louis merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Model Friedman-Meiselman tahun 1963 yang fokus pada analisis konsumsi agregat.<sup>50</sup>

Andersen & Jordan pada saat mengembangkan model St. Louis sebenarnya menyadari bahwa determinan pertumbuhan ekonomi sangatlah banyak. Dalam artikel mereka, terdapat beberapa klasifikasi determinan pertumbuhan ekonomi di antaranya variabel yang lambat berubah (preferensi, teknologi, sumberdaya, institusi, dan sistem hukum). Selain itu ada pula variabel yang terkait dengan luar negeri, seperti perdagangan internasional, nilai tukar, dan suku bunga. Ada pula variabel yang merupakan kejadian acak (*random event*) seperti perang, bencana alam, dan perubahan cuaca.<sup>51</sup> Namun demikian, mereka berpendapat bahwa representasi dari kebijakan negara sudah cukup tercermin dalam pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal) dan pengaturan jumlah uang yang beredar (kebijakan moneter). Kedua variabel inilah yang dianggap paling signifikan mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Kritik atas model St. Louis langsung muncul dari berbagai peneliti yang menganggap model tersebut terlalu menyederhanakan kompleksitas realita. Salah satu ekonom yang paling awal mengkritik model tersebut adalah Gramlich yang menginisiasi penambahan variabel ekspor dan pajak di dalam model tersebut.<sup>52</sup> Setelah itu, banyak peneliti yang menambahkan berbagai variabel sosial dan ekonomi guna melengkapi dan menambahkan model St. Louis tersebut berdasarkan argumentasi yang kuat.

Penelitian ini juga bermaksud mengembangkan model St. Louis dengan menambahkan variabel utang pemerintah dan kualitas institusi di dalam model tersebut. Utang pemerintah saat ini telah

---

<sup>50</sup> Peter V Bias, 'A Chronological Survey of the Friedman – Meiselman / Andersen – Jordan Single Equation Debate', *International Journal of Economics and Business Research*, 10.January 2014 (2014), 1–21.

<sup>51</sup> Andersen and Jordan, 'Monetary and Fiscal Actions'.

<sup>52</sup> Edward M . Gramlich, 'The Usefulness of Monetary and Fiscal Policy as Discretionary Stabilization Tools', *Journal of Money , Credit and Banking*, 3.2 (1969), 506–32.

menjadi variabel utama dalam perekonomian suatu negara, karena hampir tidak ada negara yang tidak memiliki utang pemerintah.<sup>53</sup> Variabel kedua yang ditambahkan dalam model adalah kualitas institusi, hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi terkini yang menegaskan peran penting kualitas institusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>54</sup> Penelitian ini memasukkan variabel kualitas institusi (*governance*) sebagai variabel yang memoderasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, Andersen & Jordan sudah sedikit menyinggung peran penting utang pemerintah dan institusi dalam membangun model St. Louis, namun tidak terepresentasikan ke dalam model tersebut.<sup>55</sup>

Penelitian ini memfokuskan kajian pada negara-negara muslim yang tergabung di dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI (Organisation of Islamic Cooperation, OIC). Hal ini dilakukan mengingat negara-negara OKI menghadapi permasalahan ekonomi yang hampir sama, seperti ketertinggalan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Selain itu, karakter kelembagaan formal (organisasi, konstitusi, maupun peraturan) dan informal (adat budaya, keyakinan, dan agama), juga memiliki kemiripan di antara negara anggota OKI. Hal tersebut terjadi karena ajaran agama yang dianut akan membentuk keyakinan, pola pikir dan tindakan yang seharusnya sama di antara pemeluknya di berbagai negara.<sup>57</sup>

Negara-negara berpenduduk muslim yang tergabung dalam OKI secara umum dapat dikatakan sebagai negara yang religius. Berdasarkan laporan survei *Pew Research Center* tahun 2018 terhadap 102 negara di dunia, mayoritas penduduk di negara muslim menganggap agama adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan

---

<sup>53</sup> Mankiw, 'Macroeconomics'.

<sup>54</sup> Daron Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth* (New Jersey: Princeton University Press, 2009).

<sup>55</sup> Andersen and Jordan, 'Monetary and Fiscal Actions'.

<sup>56</sup> Kuran, 'Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links'.

<sup>57</sup> Douglass C North, 'Economic Performance Through Time', *The American Economic Review*, 84.3 (1994), 359–68.

mereka. Persentase jawaban mengenai pentingnya agama di beberapa negara OKI adalah: Pakistan (94%), Indonesia (93%), Afghanistan (92%), Nigeria (88%), dan Mesir (72%). Sebaliknya, di berbagai negara lain, agama tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, seperti di China (3%), Jepang (10%), Inggris (10%), Jerman (10%), Perancis (10%), Rusia (16%), dan Australia (18%). Hanya Amerika Serikat yang lebih dari separuh (53%) penduduknya menganggap penting agama.<sup>58</sup> Berdasarkan praktik keagamaan yang rutin dilakukan (mingguan maupun harian), negara-negara muslim menunjukkan persentase yang relatif lebih tinggi daripada kelompok negara yang lain.

Sebagai bentuk perkembangan pemikiran dan respon negara-negara muslim atas perkembangan kehidupan masyarakat dunia, maka pada tahun 2008, OKI melakukan amandemen terhadap Piagam OKI. Organisasi ini tidak hanya bekerjasama di bidang ekonomi, sosial, keagamaan, dan pengetahuan sebagaimana selama ini berjalan, namun berkembang lebih jauh lagi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>59</sup> OKI berusaha menyelaraskan aktivitasnya dengan berbagai organisasi internasional lainnya, khususnya Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Isu-isu internasional terkini seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan, terorisme secara eksplisit masuk menjadi bagian dalam amandemen piagam tersebut. Termasuk pula upaya bersama negara-negara OKI untuk menciptakan *good governance* di negara masing-masing guna meraih kehidupan yang lebih baik. Isu demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta konflik keamanan menjadi perhatian bersama seluruh negara OKI.<sup>60</sup>

Keinginan negara-negara OKI tersebut secara khusus dan detail diturunkan dalam dokumen *The OIC-2025: Programme of*

---

<sup>58</sup> Research Center PEW, *The Age Gap in Religion Around the World* (Washington, 2018).

<sup>59</sup> Samiul Hasan and others, *The Muslim World in the 21st Century*, ed. by Samiul Hasan (London: Springer, 2012), 306.

<sup>60</sup> OIC, *Charter of the Organisation of Islamic Cooperation*, 2008, 1–17.

*Action*.<sup>61</sup> Dalam dokumen tersebut, OKI memiliki 18 program aksi yang merupakan prioritas kebijakan guna mencapai cita-cita bersama yang berlaku tahun 2016-2025. Bahkan secara khusus, OKI juga menerbitkan dokumen *Implementation Plan* sebagai penjabaran dari berbagai program aksi tersebut. Beberapa program kerja dan rencana implementasi yang dirancang sangat sejalan dengan penguatan tata kelola (*governance*) yang dikembangkan oleh Bank Dunia.<sup>62</sup>

Namun demikian, upaya perbaikan tata kelola (*governance*) di negara-negara OKI masih jauh dari yang dicitakan. Berbagai negara OKI masih mengalami gejolak permasalahan sosial, politik, keamanan, hukum dan birokrasi hingga saat ini. Peristiwa Arab Spring yang berlangsung pada akhir 2010 hingga awal 2011 telah membuat keguncangan dalam berbagai aspek kehidupan negara-negara muslim, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Krisis yang awalnya berupa masalah sosial dan politik telah meluas menjadi krisis keamanan, ekonomi, dan lain-lain.<sup>63</sup>

Dalam aspek demokrasi dan kebebasan bersuara, negara-negara muslim juga menjadi sorotan karena kurangnya perbaikan dari sisi tersebut. Apalagi dalam hal kesetaraan perempuan di ruang publik di negara muslim yang masih sangat lemah.<sup>64</sup> Peristiwa Arab Spring menandai meningkatnya peran wanita di bidang politik, namun secara umum wanita masih tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>61</sup> OIC, 'The OIC-2025: Programme of Action' (Jeddah, 2016), pp. 1-27.

<sup>62</sup> OIC, 'OIC-2025: Programme of Action Implementation Plan' (Jeddah, 2016), 1-55.

<sup>63</sup> Mohsin Khan, *The Economic Consequences of the Arab Spring* (Washington, 2014); Mahmoud Arayssi, Ali Fakh, and Nathir Haimoun, "Did the Arab Spring Reduce MENA Countries' Growth?", *Discussion Paper Series No. 12161* (Bonn: IZA-Institute of Labor Economics, 2019).

<sup>64</sup> Maysar Sarieddine, 'Personal Freedom Beyond Politics and Human Rights: Women, Religion and Freedom in the Arab World', *Clinical and Experimental Psychology*, 04.01 (2018), 1-6.

<sup>65</sup> Ariana Marnicio, Julia Retta, and Rebecca Satterfield, 'A Change of Seasons for Arab Women?', *Journal of Women and Human Rights in the Middle East*, Fall.1 (2013).

Dalam aspek keamanan, masih sangat banyak negara anggota OKI yang menghadapi krisis dalam negeri yang tidak kunjung usai. Berbagai gerakan militan dan aksi terorisme banyak terjadi di negara OKI.<sup>66</sup> Beberapa organisasi yang dicap sebagai pelaku aksi terorisme menyebar di berbagai negara muslim, seperti ISIS di Irak, dan Syiria; Thaliban di Afghanistan dan Pakistan; serta Boko Haram di Nigeria.<sup>67</sup> Walaupun sebenarnya berbagai aksi kekerasan dan terorisme tersebut tidak mendapat dukungan mayoritas umat Islam, namun keberadaannya seringkali diidentikkan dengan ajaran dan umat Islam.<sup>68</sup>

Permasalahan lain yang dihadapi negara-negara anggota OKI terkait dengan tata kelola (*governance*) adalah parahnya korupsi yang melanda pemerintahan. Menurut survei dari Transparansi Internasional tahun 2018, hanya ada 1 negara muslim yang masuk ke dalam 50 negara terbersih dari 180 negara yang disurvei, yaitu Uni Emirat Arab (peringkat 23). Mayoritas selebihnya menghuni peringkat lebih dari 100, bahkan beberapa diantaranya menempati posisi paling rendah, seperti Irak (168), Sudan dan Afghanistan (172), Yaman (176), Syiria (178), dan Somalia (180).<sup>69</sup> Oleh karena itu, studi terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI menjadi semakin perlu dilakukan.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

<sup>66</sup> Richard J. Estes and M. Joseph Sirgy, 'Radical Islamic Militancy and Acts of Terrorism: A Quality-of-Life Analysis', *Social Indicators Research*, 117.2 (2014), 615–52.

<sup>67</sup> Ahmed Dawoody-Al, 'ISIS and Its Brutality Under Islamic Law', *Review of Law and Politics*, March.36 (2015), 101–17.

<sup>68</sup> Kamarulnizam Abdullah and others, 'Perception and Attitudes toward Terrorism in a Muslim Majority Country', *Asian Social Science*, 8.4 (2012), 77–89.

<sup>69</sup> Datuk Seri Akhbar Satar, 'Corruption a Big Issue in Muslim-Majority Nations', *New Straits Times*, 2019 <<https://www.nst.com.my/opinion/columnists-/2019/04/480813/corruption-big-issue-muslim-majority-nations>> [accessed 22 April 2020].



1. Apakah bauran kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim?
2. Apakah kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim?
3. Apakah kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) memoderasi pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
- b. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
- c. Menganalisis dan menjelaskan peran moderasi dari kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam meningkatkan efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi.

### D. Manfaat Penelitian

1. **Kontribusi Teoritis:** Penelitian ini mengembangkan model persamaan St. Louis yang digagas oleh Andersen dan Jordan tahun 1968 sebagai alat evaluasi efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Model St. Louis menggunakan variabel penawaran uang (*money supply*, M) sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*, G) sebagai proksi dari kebijakan fiskal. Model tersebut tidak memasukkan variabel utang pemerintah yang saat ini memainkan peran penting di berbagai negara di dunia. Selain itu model tersebut tidak mempertimbangkan kualitas dari institusi pelaksana kebijakan fiskal dan moneter sama sekali. Oleh karena itu,

model dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan kerangka berfikir ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Dipilihnya obyek negara-negara muslim (anggota OKI) karena mayoritas negara tersebut berada dalam situasi ekonomi yang berkembang, bahkan ada sebagian yang tertinggal secara ekonomi. Kesamaan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas negara anggota OKI juga membentuk "institusi" sosial dan budaya yang relatif sama di antara mereka.

2. **Kontribusi Praktis:** Penelitian ini bisa dijadikan dasar bagi otoritas kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat efektivitas bauran kebijakan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengingatkan pemerintah di berbagai negara muslim untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas pemerintahan mereka berdasarkan aspek-aspek dalam indikator kualitas pemerintahan (*governance*) yang telah dicanangkan oleh Bank Dunia.
3. **Kontribusi Kebijakan:** negara-negara muslim dalam OKI bisa lebih mendorong kebijakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahannya (*governance*). Hal ini sejalan dengan implementasi amandemen Piagam OKI (*OIC Chapter*) tahun 2008 guna mencapai reformasi pemerintahan, demokratisasi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di antara negara-negara OKI. Secara lebih khusus, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan penguatan rencana implementasi dalam *The OIC-2025: Programme of Action* yang saat ini sedang berjalan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pertama yang mengembangkan model persamaan St. Louis yang digagas oleh Andersen dan Jordan sebagai model evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, dalam kerangka kerja ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Ide dasar penelitian ini adalah bahwa efektivitas

kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh instrumen kebijakan tersebut, namun juga oleh kualitas pelaksana kebijakannya serta lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menginteraksikan kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) dengan proksi dari kebijakan fiskal dan moneter (pengeluaran pemerintah dan jumlah uang yang beredar).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun mengikuti kerangka berpikir pembahasan rancangan sistematika laporan penelitian disertasi yang dibuat menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; orisinalitas penelitian; dan sistematika pembahasan. Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai dasar pemikiran dan arah penelitian ini. Kejelasan pada bab pendahuluan ini kemudian dilanjutkan pada bab kedua.

Bab kedua membahas kajian pustaka, landasan teoritis, dan pengembangan hipotesis. Kajian pustaka berisi berbagai hasil penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian terdahulu meliputi topik pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor penentunya; dampak bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian; serta institusi dan pertumbuhan ekonomi. Kajian pustaka bertujuan untuk memperjelas posisi penelitian ini di antara berbagai penelitian terdahulu. Setelah posisi tersebut jelas, maka dilanjutkan dengan pemaparan teori yang mendasari penelitian ini serta penyusunan hipotesis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pertumbuhan ekonomi; Islam dan pembangunan ekonomi; bauran kebijakan fiskal dan moneter (*fiscal and monetary mix policy*); ekonomi kelembagaan dan peningkatan efektivitas kebijakan; serta tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam berbagai perspektif ("barat" dan Islam).

Bab ketiga berisi metode penelitian yang merupakan penjelasan mengenai tahap-tahap penelitian serta perangkat penelitian yang digunakan. Perangkat yang dimaksud meliputi desain

penelitian; populasi dan sampel; pengembangan model penelitian; definisi operasional variabel; teknik analisis regresi data panel; dan pengujian hipotesis.

Metode penelitian yang diuraikan pada bab tiga kemudian dituangkan hasil pengujiannya di dalam bab empat. Bab ini diawali dengan uraian mengenai profil negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), analisis deskriptif penelitian, lalu analisis regresi data panel moderasian. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana peran dari indeks kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung (interaksi dengan kebijakan fiskal dan moneter). Pembahasan atas hasil penelitian akan dilakukan untuk mengungkap peran tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di negara-negara OKI.

Terakhir, bab kelima merupakan bab penutup yang mengungkapkan kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas masalah penelitian yang diajukan. Selain itu, dalam bab ini juga berisi implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Bauran kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah,  $G$ ) dan kebijakan moneter (jumlah uang beredar,  $M$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI. Hal ini membuktikan bahwa model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen dan Jordan tahun 1968 masih relevan hingga saat ini. Model kebijakan ekonomi dalam jangka pendek tersebut telah menunjukkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh kelompok Keynesian dan Moneteris masih bisa berjalan berdampingan. Kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan oleh negara-negara OKI (46 negara) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi efektif, walaupun di sebagian negara atau wilayah terdapat gejolak sosial, politik, dan keamanan yang mengganggu proses pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Darrat tahun 1984; Fatima & Iqbal tahun 2004; Malawi tahun 2009; Jawaid, Arif, dan Naeemullah tahun 2011; serta Chowdury dan Afzal yang kesemuanya mengaplikasikan model St. Louis tersebut. Keseluruhan penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan fiskal dan moneter sama-sama efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan studi yang dilakukan Halcon dan De Leon tahun 2004 yang menemukan bahwa kebijakan moneter tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Demikian pula dengan penelitian Ali, Irum, dan Ali tahun 2008 serta penelitian Ajayi dan Aluko tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah (G) di negara-negara OKI diduga mengalami masalah inefisiensi dan tidak tepat sasaran. Banyak anggaran pemerintah yang dikorupsi juga semakin memperburuk masalah ini sebagaimana disinyalir oleh Kuran dan Kahf. Banyak anggaran ditujukan untuk kegiatan yang kurang produktif, semisal pertahanan dan keamanan negara yang berlebihan. Belum lagi ditambah berbagai masalah perilaku buruk penguasa seperti korupsi yang menjangkiti sebagian besar negara berkembang. Temuan riset dari Conte dan Darrat; Barro; dan Guseh mengungkap fakta di berbagai negara berkembang tersebut. Namun demikian, pengeluaran pemerintah tetaplah merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara. Oleh karena itu, walaupun banyak masalah dalam pengelolaannya, pengeluaran pemerintah masih tetap berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tingkat efektivitasnya tidak setinggi variabel kebijakan moneter. Hal ini terlihat dari besarnya elastisitas pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari variabel kebijakan moneter.

Variabel jumlah uang yang beredar (M) sebagai proksi dari kebijakan moneter menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel kebijakan moneter lebih besar dari koefisien variabel kebijakan fiskal. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan moneter yang lebih besar dari kebijakan fiskal, termasuk juga lebih cepat dalam mempengaruhi perekonomian. Hasil ini sejalan dengan temuan Andersen dan Jordan ketika mengembangkan model St. Louis tahun 1968 dan beberapa penelitian sesudahnya. Guna mencapai target pembangunan

yang dituju, bauran kebijakan fiskal dan moneter di setiap negara perlu dirumuskan secara tepat dan proporsional.

Variabel utang pemerintah (D) diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis memang sudah terdapat perdebatan panjang antara kelompok yang memandang bahwa utang pemerintah berdampak positif (Keynesian), negatif (Neoklasik), maupun netral (Ricardian). Secara empiris, rata-rata utang pemerintah negara-negara OKI mencapai 45,5% dari PDB, hal ini menunjukkan besarnya tanggungan utang dan sekaligus pembayaran yang harus ditanggung oleh masing-masing negara. Tata kelola pemerintahan, termasuk pula dalam tata kelola utang pemerintah perlu ditingkatkan agar utang yang dipungut benar-benar bisa memperbaiki perekonomian negara. Akumulasi utang yang besar jika tidak dikelola dengan baik, apalagi dikorupsi oleh pengelolanya, maka tidak akan memberikan dampak terhadap perbaikan perekonomian negara. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diunggulkan oleh kelompok Keynesian, seharusnya utang bisa secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya, dalam beberapa studi yang dilakukan di berbagai negara berkembang (Schelarek; Kumar dan Woo; Sani, Said & Ismail) menunjukkan bahwa utang pemerintah berdampak buruk bagi perekonomian negara. Adapun penelitian ini menemukan bahwa utang pemerintah memiliki hubungan yang netral dengan pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI.

2. Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) secara umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Beberapa indeks *governance* dari Bank Dunia yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga birokrasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI, walau ada sebagian yang lain tidak.

Temuan penelitian ini sejalan dan mendukung teori kelembagaan (*institutional theory*) yang menjadi dasar pijakan penelitian ini. Andersen dan Jordan menyebutkan bahwa variabel institusi merupakan salah satu penentu kinerja perekonomian yang sifatnya jangka panjang, sehingga disebut sebagai "variabel yang lambat berubah". Walaupun indeks *governance* di negara-negara anggota OKI relatif rendah dibanding kelompok negara yang lain, namun tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Hanya saja disayangkan bahwa Islam yang dianut oleh sebagian besar anggota OKI belum mampu menciptakan kualitas kelembagaan yang tinggi. Padahal, ajaran agama Islam dalam al-Qur'an dan hadits sangat sejalan dengan berbagai indikator dalam indeks *governance*. Namun demikian, internalisasi ajaran Islam tersebut tidak mampu membentuk karakter kelembagaan yang positif sebagaimana teori yang dikembangkan oleh North. Konflik internal OKI, khususnya persaingan antara Arab Saudi dan Iran diduga kuat menjadi salah satu penyebab rendahnya indeks *governance*, khususnya terkait dengan *political stability*.

3. Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) tidak mampu memoderasi pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Peran kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dianalisis menggunakan teori biaya transaksi (*transaction cost theory*) mengindikasikan bahwa indeks *governance* akan lebih efektif dalam memoderasi aktivitas ekonomi sektor swasta, bukannya kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, indeks tata kelola pemerintahan (*governance*) tidak mampu memperkuat peran kebijakan fiskal dan moneter. Pada sisi lain indeks *governance* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak mampu meningkatkan dampak positif kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, dalam model penelitian ini, indeks



*governance* lebih tepat disebut sebagai variabel independen daripada sebagai variabel moderasi.

## B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan implikasi secara teoritis dan kebijakan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintah (*governance*) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini berkontribusi pada teori pertumbuhan ekonomi yang sudah berkembang saat ini (Keynesian, Klasik-Neoklasik, dan Endogen). Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain berbagai variabel ekonomi konvensional yang sudah banyak dikaji. Namun demikian, teori kelembagaan oleh North yang menyebutkan bahwa agama menjadi salah satu pembentuk karakter kelembagaan yang positif tidak terjadi di negara-negara muslim (anggota OKI). Negara-negara OKI yang menurut hasil survei dari *Pew Research Center* memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi (diukur melalui aspek keyakinan dan praktik peribadahan rutin) sudah dinilai baik, belum tentu menghasilkan kelembagaan (sosial, politik, budaya, dan lain-lain) yang tinggi pula. Relijiusitas keislaman masyarakat masih terbatas dalam bentuk peribadahan formal, namun belum tercermin dengan baik dalam karakter sosial umat Islam. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh berbagai teori yang bisa menjelaskan tentang mengapa terjadi gap antara ajaran agama, tingkat keberagamaan, dan karakter kelembagaan sosial umat Islam secara umum.
2. Implikasi Kebijakan: Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintah (*governance*) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pengelolaan pemerintahan di negara-negara muslim yang

masih perlu ditingkatkan. Mengacu pada keenam indeks tata kelola pemerintahan (*governance*) yang diterbitkan oleh Bank Dunia, pemerintah di negara-negara muslim perlu memperbaiki tiap aspeknya guna mendukung pembangunan ekonomi di masing-masing negara.

Amandemen Piagam OKI pada tahun 2008 adalah sebuah langkah progresif guna merespon isu-isu internasional terkini seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan, terorisme secara eksplisit masuk menjadi bagian dalam amandemen piagam tersebut. Isu demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta konflik keamanan menjadi perhatian bersama seluruh negara OKI. Termasuk pula upaya bersama negara-negara OKI untuk menciptakan *good governance* di negara masing-masing guna meraih kehidupan yang lebih baik seperti yang sudah disepakati dalam *The OIC-2025: Programme of Action and Implementation Plan*. Namun demikian, kesepakatan dalam Piagam OKI tersebut harus betul-betul dipastikan menjadi perhatian yang serius oleh seluruh negara anggota OKI. Perlu ada mekanisme yang jelas agar seluruh negara OKI berupaya maksimal dalam menciptakan kondisi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menyusun panduan yang jelas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas *governance* yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. OKI melalui lembaga *International Islamic Fiqh Academy (IIFA)* dapat bekerjasama dengan forum ulama di tiap negara anggota guna menggali dan merumuskan konsep *good Islamic governance* yang dapat diterapkan oleh seluruh negara anggota OKI sekaligus memberikan saran dalam implementasinya.

3. Implikasi metodologis: Bank Dunia menerbitkan indeks *governance* yang meliputi keenam sub-indeks sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya membentuk indeks gabungan (*composite*) yang berasal dari rata-rata keenam indeks tata kelola (*governance index*)

sebagaimana yang dilakukan oleh Vianna dan Malik serta Sani, dkk. Penelitian ini melakukan penggabungan atau reduksi dengan metode analisis faktor (*factor analysis*). Perhitungan dengan metode rata-rata mengasumsikan karakter dan dinamika seluruh dimensi atau variabel adalah sama, padahal pada kenyataannya belum tentu. Analisis faktor (*factor analysis*) adalah teknik penggabungan indikator atau dimensi yang memungkinkan menangkap informasi sebanyak mungkin, sehingga hasil reduksi tersebut menjadi valid. Hasil analisis faktor menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata, demikian pula ketika dilakukan uji *robust*. Namun demikian, secara metodologis, penggunaan analisis faktor guna membentuk indeks gabungan diyakini lebih baik daripada sekedar menghitung nilai rata-rata.

### C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian disertasi ini masih memiliki banyak kelemahan yang belum bisa diatasi untuk saat ini. Diharapkan kekurangan dan kelemahan tersebut dapat diperbaiki dalam berbagai penelitian yang akan datang. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketersediaan data karena di sebagian negara muslim tidak lengkap, sehingga dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hanya terdapat 46 negara yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Demikian pula periode penelitian terbatas pada tahun 2005-2018 karena data pada periode sebelum dan sesudahnya belum lengkap terisi. Hal ini disebabkan karena adanya konflik di sebagian negara muslim yang menyebabkan Bank Dunia tidak mampu menampilkan data negara terkait.
2. Proksi atau wakil dari variabel penelitian masih sangat mungkin dikembangkan, khususnya variabel pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan moneter. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh hasil yang lebih meyakinkan lagi

guna menjadi dasar kesimpulan dan kebijakan yang bias diambil.

3. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian semacam ini masih bisa dikembangkan. Penggunaan data penelitian yang berupa data panel (gabungan antara data kerat silang dan runtun waktu), dapat dianalisis menggunakan metode yang berbeda dari analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Indeks kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) yang diterbitkan oleh Bank Dunia adalah salah satu di antara berbagai indeks yang lain. Oleh karena itu, penggunaan indeks lain yang sejenis dan membandingkan hasilnya akan mengkonfirmasi temuan dalam penelitian ini. Diharapkan kesimpulan yang diperoleh akan lebih kuat dan menunjukkan konsistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbary, Islam, and James Benhin, 'Governance, Capital and Economic Growth in the Arab Region', *Quarterly Review of Economics and Finance*, 2018, 1–24
- Abdullah, Kamarulnizam, Rizal Sukma, Ma'ruf Jamhari, and Mazilan Musa, 'Perception and Attitudes toward Terrorism in a Muslim Majority Country', *Asian Social Science*, 8.4 (2012), 77–89
- Acemoglu, Daron. *Introduction to Modern Economic Growth*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
- Agus Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*, 4th edn. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Ahmad, M. Rais, 'Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam', *Mizan, Jurnal Ilmu SYariah*, 1.2 (2013), 143–48
- Ahmad, Mahyudin, and Stephen G. Hall, 'Economic Growth and Convergence: Do Institutional Proximity and Spillovers Matter?', *Journal of Policy Modeling*, 39.6 (2017), 1065–85
- Ahmed, Zahid Shahab, and Shahram Akbarzadeh, 'Sectarianism and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC)', *Territory, Politics, Governance*, 2019, 1–18
- Aidt, Toke, Jayasri Dutta, and Vania Sena, 'Governance Regimes , Corruption and Growth : Theory and Evidence', *Journal of Comparative Economics*, 36 (2008), 195–220
- Ajayi, Michael Adebayo, and Olufemi Adewale Aluko, 'Evaluating the Relative Impact of Monetary and Fiscal Policy in Nigeria Using the St. Louis Equation', *Acta Universitatis Danubius : Oeconomica*, 13.1 (2017), 40–50
- Akbarzadeh, Shahram, and Zahid Shahab Ahmed, 'Impacts of Saudi

Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)', *International Journal of Politics, Culture and Society*, 31.3 (2018), 297–311

Al-Ahsan, Abdullah, N. Doran Hunter, Abdul Rashid Moten, Stephen B. Young, Muhammad Arif Zakauallah, Zaleha Kamaruddin, and others, *Qur'anic Guidance for Good Governance: A Contemporary Perspective*, ed. by Abdullah Al-Ahsan and Stephen B. Young. Delaware: Palgrave Macmillan, 2017.

Al-Jarhi, Mabid Ali, 'The Islamic Political System: A Basic Value Approach', *MPRA Paper No. 72706*, 74924, 2017

Al-Momani, Mohammed, 'Economic Corruption and Treatment, Perspectives of Islam and Capitalism (Comparison Study)', *Journal of Economics and Development Studies*, 3.3 (2015), 123–34

Alam Choudhury, Masudul, and Mohammad Hoque, Ziaul, 'Corporate Governance in Islamic Perspective', *Corporate Governance International Journal of Business in Society*, 6.2 (2006), 116–28

Alam Choudhury, Masudul, and Mohammad Nurul Alam, 'Corporate Governance in Islamic Perspective', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6.3 (2013), 180–99

Ali, Shahid, Somia Irum, and Asghar Ali, 'Whether Fiscal Stance or Monetary Policy Is Effective for Economic Growth in Case of South Asian Countries?', *Pakistan Development Review*, 47.4 (2008), 791–99

Alqahtani, Saif Mohammad, 'Trade Openness, Government Spending, Institutions and Their Effects on Economic Growth in Selected MENA Countries' .Eastern Illinois University, 2018.

Andersen, Leonall C., and Jerry L. Jordan, 'Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic

Stabilization', *Review*, 68.8 (1968), 11–24

Antonakakis, Nikolaos, Juncal Cunado, George Filis, and Fernando Perez de Gracia, 'Oil Dependence, Quality of Political Institutions and Economic Growth: A Panel VAR Approach', *Resources Policy*, 53.July 2016 (2017), 147–63

Aparicio, Sebastian, David Urbano, and David Audretsch, 'Institutional Factors, Opportunity Entrepreneurship and Economic Growth: Panel Data Evidence', *Technological Forecasting and Social Change*, 102 (2016), 45–61

Arafa, Mohamed, 'Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice?', *Annual Survey of International & Compliance Law*, 18.1 (2012), 171–242

Arayssi, Mahmoud, Ali Fakih, and Nathir Haimoun, *Did the Arab Spring Reduce MENA Countries' Growth?*, Discussion Paper Series No. 12161 (Bonn: IZA-Institute of Labor Economics, 2019)

Arjomand, Mansoor, Karim Emami, and Farshid Salimi, 'Growth and Productivity; The Role of Budget Deficit in the MENA Selected Countries', *Procedia Economics and Finance*, 36.16 (2016), 345–52

Ascarya, 'Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14.3 (2012), 283–316

Asian Development Bank, *Asian Development Outlook 2013 Update: Governance and Public Service Delivery* (Manila: Asian Development Bank, 2013)

Aziz, Khadija, and Sonia Ambreen, 'Roadmap for Ensuring Good Governance in Islamic Perspective', *FWU Journal of Social Sciences*, 11.1 (2017), 331–39

Azzam, Muhammad, Chandra Prabhakar Emirullah, and Qayyum Khan, 'The Role of External Debt in Economic Growth of Indonesia – A Blessing of Burden?', *World Applied Sciences*

*Journal*, 25.18 (2013), 1150–57

Bacik, Gokhan, ‘The Genesis, History, and Functioning of the Organization of Islamic Cooperation (OIC): A Formal-Institutional Analysis’, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 31.4 (2011), 594–614

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2015* (Jakarta, 2016)

Bardhan, Pranab, ‘Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development’, *The Economic Theory of Agrarian Institutions*, December 1987, 2003, 3–15

Baron, Reuben M, and David A Kenny, ‘The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations’, *Journal of Personality and Social Psychology*, 51.6 (1986), 1173–82

Barro, Robert J., ‘Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study’, *NBER Working Paper 5698*, XX (1996), 317–31

———, ‘Economic Growth in a Cross Section of Countries’, *The Quarterly Journal of Economics*, 106.2 (1991), 407–43

Barro, Robert J., and Jong Wha Lee, ‘Sources of Economic Growth’, *Carnegie-Rochester Confer. Series on Public Policy*, 40.C (1994), 1–46

Bekhet, Hussain Ali, Nurul Wamilah, and Abdul Latif, ‘The Impact of Technology in Society The Impact of Technological Innovation and Governance Institution Quality on Malaysia ’ s Sustainable Growth : Evidence from a Dynamic Relationship’, *Technology in Society*, 54 (2018), 27–40

Bhat, Alli Muhammad, ‘Freedom of Expression from Islamic Perspective’, *Journal of Media and Communication Studies*, 6.5 (2014), 69–77

Bias, Peter V, ‘A Chronological Survey of the Friedman –



- Meiselman / Andersen – Jordan Single Equation Debate’, *International Journal of Economics and Business Research*, 10.January 2014 (2014), 1–21
- Blanchard, Olivier Jean, and David R. Johnson, *Macroeconomics*, ed. by Donna Battista, *Macroeconomics*, 6th edn. New Jersey: Prentice Hall, 2013.
- Boudreaux, Christopher J., Boris N. Nikolaev, and Peter Klein, ‘Socio-Cognitive Traits and Entrepreneurship: The Moderating Role of Economic Institutions’, *Journal of Business Venturing*, 34.1 (2019), 178–96
- Boukhatem, Jamel, and Fatma Ben Moussa, ‘The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries’, *Borsa Istanbul Review*, 18.3 (2018), 231–47
- Çamlıbel, Durmuş Alper, ‘What Are the Determinants of Economic Growth in Muslim Countries?’, *International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 11.1 (2014), 403–26
- Campante, Filipe, and David Yanagizawa-Drott, ‘Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan’, *The Quarterly Journal of Economics*, 130 (2015), 615–58
- Catrinescu, Natalia, Miguel Leon-Ledesma, Matloob Piracha, and Bryce Quillin, ‘Remittances, Institutions, and Economic Growth’, *World Development*, 37.1 (2009), 81–92
- Chowdhury, L. S. & Afzal, M. N. I., ‘The Effectiveness of Monetary Policy and Fiscal Policy in Bangladesh’, *Journal of Applied Business and Economics*, 17.1 (2015), 78–85
- Cnossen, Sijbren, and Hans-Werner Sinn, *Public Finance and Public Policy in the New Century*. Manila: The MIT Press, 2003. III  
<<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>
- Conte, Michael A., and Ali F. Darrat, ‘Economic Growth and the Expanding Public Sector: A Reexamination’, *The Review of*

*Economics and Statistics*, 70.2 (1988), 322–30

Ćorić, Tomislav, Hrvoje Šimović, and Milan Deskar-Škrbić, 'Monetary and Fiscal Policy Mix in a Small Open Economy: The Case of Croatia', *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 28.1 (2015), 407–21

Darrat, Ali F., 'The Dominant Influence of Fiscal Actions in Developing Countries', *Eastern Economic Journal*, 10.3 (1984), 271–84

Dawoody-Al, Ahmed, 'ISIS and Its Brutality Under Islamic Law', *Review of Law and Politics*, March.36 (2015), 101–17

Dinh, Trang Thi-huyen, Duc Hong Vo, Anh The Vo, and Thang Cong Nguyen, 'Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries', *Journal of Risk Financial Management*, 12.176 (2019), 1–11

Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Richard Startz, *Macroeconomics*, 11th edn. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.

Duan, Xin, 'Principal Factor Analysis of Stock Market Sentiment' (The Chinese University, 2007)  
<<https://core.ac.uk/download/pdf/48548768.pdf>>

Dzhumashev, Ratbek, 'Corruption and Growth: The Role of Governance, Public Spending, and Economic Development', *Economic Modelling*, 37 (2014), 202–15

Er, Mevliyar, 'Corruption from the Islamic Perspective: Some Recommendations for the MENA Region', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1.1 (2008), 31–51

Esposito, John L., 'Islam and Political Violence', *Religions*, 6.3 (2015), 1067–81

Estes, Richard J., and M. Joseph Sirgy, 'Radical Islamic Militancy

- and Acts of Terrorism: A Quality-of-Life Analysis', *Social Indicators Research*, 117.2 (2014), 615–52
- Evans, Peter, and James E. Rauch, 'Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economic Growth', *American Sociological Review*, 64.5 (1999), 748–65
- Facchini, François, 'Economic Freedom in Muslim Countries: An Explanation Using the Theory of Institutional Path Dependency', *Documents de Travail Du Centre d'Economie de La Sorbonne*, 15 (2011), 1–25
- Falade, Olanipekun Emmanuel, and Benjamin Ayodele Folorunso, 'Fiscal and Monetary Policy Instruments and Economic Growth Sustainability in Nigeria', *American Journal of Economics*, 5.6 (2015), 587–94
- Fatima, Ambreen, and Azhar Iqbal, 'The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies: An Econometric Study', *Pakistan Economic and Social Review*, 41.1/2 (2003), 93–116
- Fernando, MACSS, S Samita, and R Abeynayake, 'Modified Factor Analysis to Construct Composite Indices: Illustration on Urbanization Index', *Tropical Agricultural Research*, 23.4 (2012), 327–37
- Flachaire, Emmanuel, Cecilia García-Peñalosa, and Maty Konte, 'Political Versus Economic Institutions in the Growth Process', *Journal of Comparative Economics*, 42.1 (2014), 212–29
- Froyen, Richard, *Macroeconomics: Theories and Policies*, 7th edn. New York: Macmillan, 2002)
- Ghafran, Chaudhry, and Sofia Yasmin, 'Ethical Governance: Insight from the Islamic Perspective and an Empirical Enquiry', *Journal of Business Ethics*, 2019
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: BP-Undip, 2013.

- Glaeser, Edward L., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de Silances, and Andrei Shleifer, 'Do Institutions Cause Growth?', *NBER Working Paper Series*, 10568 (2004), 1–31
- Gouda, Moamen, *Islamic Constitutionalism and Rule of Law: A Constitutional Economics Perspective, Constitutional Political Economy*, 2013, XXIV
- Gramlich, Edward M ., 'The Usefulness of Monetary and Fiscal Policy as Discretionary Stabilization Tools', *Journal of Money, Credit and Banking*, 3.2 (1969), 506–32
- Gray, Simon, Philippe Karam, Vilada Meeyam, and Michel Stubbe, *Monetary Issues in the Middle East and North Africa Region*. Washington: International Monetary Fund, 2013.
- Grossman, Philip J., 'Government and Growth: Cross-Sectional Evidence', *Public Choice*, 65 (1990), 217–27
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics*, 4th edn. New York: McGraw-Hill Book Co., 2004.
- Guseh, James S, 'Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-Economy Framework', *Journal of Macroeconomics*, 19.1 (1997), 175–92
- Gutmann, Jerg, and Stefan Voigt, *The Rule of Law and Islam, ILE WP Series, No. 13* (Hamburg, 2018)
- Hadj Fraj, Salma, Mekki Hamdaoui, and Samir Maktouf, 'Governance and Economic Growth: The Role of the Exchange Rate Regime', *International Economics*, 156 (2018), 326–64
- Hafeez, Malik M, 'An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives', *International Journal of Business, Economics and Law*, 2.3 (2013), 98–103
- Halcon, Neil Angelo C., and Leah Melissa T. De Leon, 'Efficiency of Fiscal And Monetary Policies In The Philippines: The St. Louis Model Approach', *Bangko Sentral Review*, July, 2004, 33–44

- Hartmann, Frank G.H., and Frank Moers, 'Testing Contingency Hypotheses in Budgetary Research: An Evaluation of the Use of Moderated Regression Analysis', *Accounting, Organizations and Society*, 24.4 (1999), 291–315
- , 'Testing Contingency Hypotheses in Budgetary Research Using Moderated Regression Analysis: A Second Look', *Accounting, Organizations and Society*, 28.7–8 (2003), 803–9
- Hasan, Samiul, George Odhiambo, Saif Al Qaydi, Abdul Quddus, Moniruzzaman, Anis Chowdhury, and others, *The Muslim World in the 21st Century*, ed. by Samiul Hasan. London: Springer, 2012.
- Hasan, Zulkifli, 'Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives', *International Review of Business Research Papers*, 5.1 (2009), 277–93
- Hasnul, Al Ghifari, 'The Effects of Government Expenditure on Economic Growth: The Case of Malaysia', *MPRA Paper No. 71254*, 2015, pp. 1–15
- Huang, Chiung Ju, and Yuan Hong Ho, 'Governance and Economic Growth in Asia', *North American Journal of Economics and Finance*, 39.100 (2017), 260–72
- Hussain, Tariq, and Muhammad Wasif Siddiqi, 'Fiscal, Monetary Policies and Institutions' Role (Political, Social and Economic) in Pakistan', *Theoretical and Applied Economics*, 19.6 (2012), 33–50
- Ilishev, Ildus G, *The Iran-Saudi Arabia Conflict and Its Impact on the Organization of Islamic Cooperation*, 2016
- IMF, *International Monetary Fund Handbook*, ed. by Bernhard Fritz-Krockow and Parmeshwar Ramlogan, *International Monetary Fund Handbook* (Washington, 2007)
- Imran Haider Naqvi, Shazia Aziz, Syed Abbas Haider Zaidi, and Kashif-ur-Rehman, 'The Model of Good Governance in Islam', *African Journal of Business Management*, 5.27 (2011), 10984–

- Iqbal, Zafar, and Mervyn Lewis, ‘Governance and Corruption: Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?’, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 19.2 (2006), 1–33
- Jacobs, Frank, ‘These Are All the World’s Major Religions in One Map’, *World Economic Forum*, 2019
- Jamshidi, Mohammad Hossein, and Maryam Safari, ‘Principles of Good Governance in the “Charter of Malik Al-Ashtar” (Comparative Analysis of Good Governance Indicators of the World Bank and the Mundane Aspects of Alavi Governance in the Charter of Malik Al-Ashtar)’, *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, Special Issue, 2016, 639–59
- Jawaid, Syed Tehseen, Imtiaz Arif, and S M Naeemullah, ‘Comparative Analysis of Monetary and Fiscal Policy: A Case Study of Pakistan’, *MPRA Paper No. 30850*, 2011, 1–11
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, 2nd edn. Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Joni Tamkin Bin Borhan, Che, ‘Economic Functions of The State: An Islamic Perspective’, *Jurnal Usuluddin*, Volume 16.Issue 16 (2015)
- Kahf, Monzer, ‘Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy’, *IRTI Research Paper*, 42 (1997)
- Kar, Sabyasachi, Amrita Roy, and Kunal Sen, ‘The Double Trap: Institutions and Economic Development’, *Economic Modelling*, 76 (2019), 243–59
- Karlsson, Matilda, and Martin Nilsson, ‘Islamic Terrorism: A Qualitative, Comparative Case Study between Al-Qaeda and Boko Haram’. Linnaeus University, 2015.

- Kaufmann, Daniel, 'The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues', September, 2010
- Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay, 'Growth without Governance', *Policy Research Working Paper Series*, 2928 (2002), 1–50
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton, 'Governance Matters', *Policy Research Working Paper*, 2196, 1999, 1–70
- Keefer, Philip, and Stephen Knack, 'Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation', *Economic Inquiry*, 35 (1997), 590–602
- Khan, M. A. Muqtedar, *Islam and Good Governance*. Delaware: Palgrave Macmillan, 2019.
- Khan, Mohsin, *The Economic Consequences of the Arab Spring* (Washington, 2014)
- Khatab, Sayed, and Gary D. Bouma, *Democracy In Islam (Routledge Studies in Political Islam)*, Routledge. New York: Routledge, 2007.
- Kim, Dong-Hyeon, Yi-Chen Wu, and Shu-Chin Lin, 'Heterogeneity in the Effects of Government Size and Governance on Economic Growth', *Economic Modelling*, 68 (2017), 205–16
- Knack, Stephen, and Philip Keefer, 'Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures', *Economics and Politics*, 7.3 (1995), 207–27
- KNKG, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan EKonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2001.
- , *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, 3rd edn. Jakarta: Erlangga, 2009.

- Kuran, Timur, 'Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links', *Journal of Economic Literature*, 56.4 (2018), 1292–1359
- , 'Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation', *Journal of Economic Perspectives*, 18.3 (2004), 71–90
- Lee, Chien Chiang, Chi Hung Chang, Mohamed Arouri, and Chi Chuan Lee, 'Economic Growth and Insurance Development: The Role of Institutional Environments', *Economic Modelling*, 59 (2016), 361–69
- Lu, Xun, and Halbert White, 'Robustness Checks and Robustness Tests in Applied Economics', *Journal of Econometrics*, 178.1 (2014), 194–206
- Luciani, Giacomo, 'On the Economic Causes of the Arab Spring and Its Possible Developments', in *Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability*, ed. by Kjetil Selvik and Bjørn Olav Utvik. London: Routledge, 2015. 188–204
- Mahmod, Nik Ahmad Kamal Nik, 'Good Governance and The Rule of Law', in *The First International Conference on Law, Business and Government*. (Bandar Lampung, 2013. I.45-I.55
- Malawi, A. I., 'The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in Economic Activity: A Comparison between Jordan and Tunisia by Using an Error Correction Mechanism (ECM).', *Dirasat, Administrative Sciences*, 36.1 (2009), 191–98
- Malik, Maszlee, *Foundations of Islamic Governance*. New York: Routledge, 2017
- Mamingi, Nlandu, and Kareem Martin, 'Foreign Direct Investment and Growth in Developing Countries: Evidence from the Countries of the Organisation of Eastern Caribbean States', *CEPAL Review*, 124 (2018), 79–98
- Al Mamun, Md, Kazi Sohag, and M. Kabir Hassan, 'Governance, Resources and Growth', *Economic Modelling*, 63. February



(2017), 238–61

Mankiw, Gregory, David Romer, and David Weil, ‘A Contribution to the Empirics of Economic Growth’, *Quarterly Journal of Economics*, 107.2 (1992), 407–37

Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics*, 7th edn. New York: Worth Publisher, 2010.

Manzocchi, Stefano, ‘External Finance and Foreign Debt in Central and Eastern European Countries’, *IMF Working Paper*, WP/97/134 (1997), 1–28

Marnicio, Ariana, Julia Retta, and Rebecca Satterfield, ‘A Change of Seasons for Arab Women?’, *Journal of Women and Human Rights in the Middle East*, Fall.1 (2013)

Mathonnat, Clément, and Alexandru Minea, ‘Forms of Democracy and Economic Growth Volatility’, *Economic Modelling*, 2018, 1–10

Misztal, Piotr, ‘Public Debt and Economic Growth in the European Union’, *Journal of Applied Economic Sciences (JAES)*, 5.3(13) (2010), 292–302

Montiel, Peter, ‘The Transmission Mechanism for Monetary Policy in Developing Countries’, *IMF Staff Papers*, 38.1 (1990), 83–108

Mubarak, Abdulkadir, ‘Democracy from Islamic Law Perspective’, *KOM*, V.3 (2016), 1–18

Nadeem-ud-din, Muhammad Ali, and Aazadi Fateh Muhammad, ‘Good Governance in Islam: A Conceptual Study’, *Pakistan Journal of Islamic Research*, 17 (2016), 103–12

Nardo, Michela, Michaela Saisana, Andrea Tarantola, and Saltelli Stefano, *Tools for Composite Indicators Building* (Ispra, Italy, 2005)

<[http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://farmweb.jrc.ec.europa.eu/ci/Document/EUR\\_21682\\_EN.pdf](http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://farmweb.jrc.ec.europa.eu/ci/Document/EUR_21682_EN.pdf)>

‘No Title’

North, Douglass C, ‘Economic Performance Through Time’, *The American Economic Review*, 84.3 (1994), 359–68

Norton, Seth W., ‘Economic Institutions and Human Well-Being: A Cross-National Analysis’, *Eastern Economic Journal*, 29.1 (2003), 23–40

Ogar, A., S. E. Nkamare, and E. G. Emori, ‘Fiscal and Monetary Policy and Its Effect on the Growth of Nigeria Economy’, *European Journal of Business and Management*, 6.29 (2014), 220–32

OIC-Secretary, ‘International Islamic Fiqh Academy’, *OIC*, 2020 <[https://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=64&p\\_ref=33&lan=en#FIQH](https://www.oic-oci.org/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en#FIQH)> [accessed 2 June 2020]

OIC, *Charter of the Organisation of Islamic Cooperation*, 2008, 1–17

———, ‘History The Organisation of Islamic Cooperation’, 2019 <[https://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en)>

———, ‘OIC-2025: Programme of Action Implementation Plan’ (Jeddah, 2016), 1–55

———, ‘The OIC-2025: Programme of Action’—Jeddah, 2016. 1–27

Olson, Mancur Jr, Naveen Sarna, and Anand V Swamy, ‘Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross-Country Differences in Productivity Growth’, *Public Choice*, 102 (2000), 341–64

Perry, Nathan, *Debt and Deficits: Economic and Political Issues*. Tuft: Global Development and Environment Institute, 2014

PEW, Research Center, *The Age Gap in Religion Around the World*. Washington, 2018.

- Pryor, Frederic L., 'The Economic Impact of Islam on Developing Countries', *World Development*, 35.11 (2007), 1815–35
- Qadirmushtaq, Abdul, and Muhammad Afzal, 'Arab Spring: Its Causes and Consequences', *JPUHS*, 30.1 (2017), 1–10
- Quibria, M.G., 'Does Governance Matter? Yes, No or Maybe: Some Evidence from Developing Asia', *KYKLOS*, 59.1 (2006), 99–114
- Rachdi, Housseem, Abdelaziz Hakimi, and Helmi Hamdi, 'Liberalization, Crisis and Growth in MENA Region: Do Institutions Matter?', *Journal of Policy Modeling*, 40.4 (2018), 810–26
- Rajkumar, Andrew Sunil, and Vinaya Swaroop, 'Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?', *Journal of Development Economics*, 86 (2008), 96–111
- Revelle, William, 'Dimension Reduction Through Factor Analysis, Principal Components Analysis and Cluster Analysis' (Illinois: Northwestern University, 2017), 135
- Saat, Norshahril, *The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia, Kajian Malaysia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018., xxxvi
- Sabra, Mahmoud M, 'Government Size, Country Size, Openness and Economic Growth in Selected MENA Countries', *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research*, 9.1 (2016), 39–45
- Saeed, Riaz Ahmad, 'Quranic Concept of Freedom of Expression : A Descriptive Study in Modern Socio-Political Perspective', *Al-Qalam*, 18.1 (2013), 70–88
- Said, Noor Asma, and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, 'Freedom of Speech in Islam and Its Connection with Street Demonstrations', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7.4 (2017), 122–29

- Saidon, Rafeah, Universiti Teknologi Mara, Che Zuina Ismail, Universiti Teknologi Mara, Mohamad Zaid, Mohd Zin, and others, 'Analysing the Principles of Good Family Governance from the Islamic Law Perspective', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22.3 (2019), 1–8
- Sani, Abdullahi, Rusmawati Said, Normaz Wana Ismail, and Nur Syazwani Mazlan, 'Public Debt, Institutional Quality and Economic Growth in Sub-Saharan Africa', *Institutions and Economies*, 11.3 (2019), 39–64
- Sarieddine, Maysar, 'Personal Freedom Beyond Politics and Human Rights: Women, Religion and Freedom in the Arab World', *Clinical and Experimental Psychology*, 04.01 (2018), 1–6
- Satar, Datuk Seri Akhbar, 'Corruption a Big Issue in Muslim-Majority Nations', *New Straits Times*, 2019 <<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/04/480813/corruption-big-issue-muslim-majority-nations>> [accessed 22 April 2020]
- Schlarek, Alfredo, 'Debt and Economic Growth in Developing and Industrial Countries', *Lund University Departement of Economics Working Paper*, 34 (2004), 1–37
- Scully, Gerald W., 'The Institutional Framework and Economic Development', *Journal of Political Economy*, 96.3 (1988), 652–62
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie, *Research Methods for Business*, 7th edn. West Sussex: John Wiley & Son, 2016.
- SESRIC, *OIC Economic Outlook 2018*. Ankara, 2018.
- Setyono, Joko, 'Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)', *Muqtasid*, 6.1 (2015), 25–40
- Setyowati, Ro'fah, Lastuti Abubakar, and Nunung Rodliah, 'Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia', *Diponegoro Law*

*Review*, 2.1 (2017), 227–48

Sharipov, Ilkhom, ‘Contemporary Economic Growth Models and Theories: A Literature Review’, *CES Working Papers*, VII.3 (2015), 759–73

Sharma, Subhash, Richard M. Durand, and Oded Gur-Arie, ‘Identification and Analysis of Moderator Variables’, *Journal of Marketing Research*, 18.3 (1981), 291

Sharqieh, Ibrahim, ‘Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?’, *Peace and Conflict Studies*, 19.2 (2012), 219–36

Siddiqui, Danish Ahmed, and Qazi Masood Ahmed, ‘The Effect of Institutions on Economic Growth: A Global Analysis Based on GMM Dynamic Panel Estimation’, *Structural Change and Economic Dynamics*, 24.1 (2013), 18–33

Siddiqui, Rehana, and Afia Malik, ‘Debt and Economic Growth in South Asia’, *The Pakistan Development Review*, 40.4 (2001), 677–88

Simorangkir, Iskandar, *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, 2014. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Slesman, Ly, Ahmad Zubaidi, Baharumshah, and Wahabuddin Ra’ees, ‘Institutional Infrastructure and Economic Growth in Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)’, *Economic Modelling*, 51 (2015), 214–26

Stegmann, Franz Josef, *Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement*, ST AUGUSTINE PAPERS, 2004, v

Sugiono, ‘Konsep, Identifikasi, Alat Analisis Dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator’, *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 1.2 (2004), 61–70

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, 3rd edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Svoboda, Eva, Steven A Zyck, Daud Osman, and Abdirashid Hashi, *Islamic Humanitarianism and Beyond*. London, 2015.
- Tarlow, Peter E., 'Religion, Violence, and Terrorism', *International Journal of Safety and Security in Tourism and Hospitality*, 12.1 (2015), 48–56
- Taufiq, Imam, 'Transparency and Accountability in The Qur'a and Its Role in Building Good Governance', *International Journal of Business, Economics and Law*, 6.4 (2015), 73–81
- , 'Transparency and Accountability in the Qur'an and Its Role in Building Good Governance', *International Journal of Business, Economics and Law*, 6.4 (2015), 73–81
- Teixeira, Nuno, *Democracy and the Muslim World*. London: Routledge, 2008.
- The World Bank, *Governance and Development*. Washington: A World Bank Publication, 1992.
- Uddin, Md Akther, 'Governance from Islamic Economic Perspective: A Shari'ah Governance Framework', *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 67695, 2015
- Usman, M., Shahzad Ahmed, Javed Ferzund, Atif Mehmood, and Abbas Rehman, 'Using PCA and Factor Analysis for Dimensionality Reduction of Bio-Informatics Data', *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8.5 (2017), 415–26
- Vanegas, Manuel, 'Tourism, Macroeconomics, Growth, and the St. Louis Equation', *Tourism Review International*, 22.1 (2018), 3–21
- Vianna, Andre C., and Andre V. Mollick, 'Institutions: Key Variable for Economic Development in Latin America', *Journal of Economics and Business*, 96 (2018), 42–58
- Warjiyo, Perry, and Solikin, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2003

- Williams, Kevin, 'Do Political Institutions Improve the Diminishing Effect of Financial Deepening on Growth? Evidence from Developing Countries', *Journal of Economics and Business*, 103 (2019), 13–24
- Wilson, Ross, 'Does Governance Cause Growth? Evidence from China', *World Development*, 79 (2016), 138–51
- Wiryanto, Wisber, 'The Comparison of Unescap's Characteristics of Good Governance and Islamic Characteristics of Governance for Public Services Reform in Indonesia', *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2.2 (2018), 123–41
- Woo, Jaejoon, and Manmohan S. Kumar, 'Public Debt and Growth', *Economica*, 82.328 (2015), 705–39
- Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, Dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Zallé, Oumarou, 'Natural Resources and Economic Growth in Africa: The Role of Institutional Quality and Human Capital', *Resources Policy*, 62.October (2019), 616–24
- Zsolt, Szabo, 'The Effect of Sovereign Debt on Economic Growth and Economic Development', 2012, 251–70  
<[https://www.asz.hu/storage/files/files/public-finance-quarterly-articles/2013/a\\_szabo\\_2013\\_3.pdf](https://www.asz.hu/storage/files/files/public-finance-quarterly-articles/2013/a_szabo_2013_3.pdf)>
- Zwerg, Anne Marie, and Luis Carlos Arango, 'The Impact of Foreign Direct Investment on Developing Economies and the Environment', *AD-MINISTER Universidad EAFIT Medellín*, 13 (2008), 20–37